



**PELATIHAN KECAKAPAN HIDUP  
DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN EKS WTS  
DI UPT REHABILITASI SOSIAL TUNA SUSILA KEDIRI**

**SKRIPSI**

Disusun sebagai Salah satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Program Studi Pendidikan Non Formal

Oleh

Ivanovich Hutama Anandhi

1201411021

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
JURUSAN PENDIDIKAN NON FORMAL

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Palatihan Kecakapan Hidup Dalam Meningkatkan Perekonomian Eks Wts Di UPT Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri" ini telah disetujui pembimbing untuk diajukan dalam sidang panitia skripsi pada:

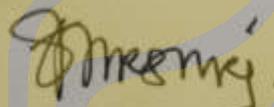
Hari : Rabu  
Tanggal : 10 Mei 2017

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing 1



Dr. Utsman, M.Pd.  
NIP. 195708041981031006

Dosan Pembimbing 2



Dr. Tri Suminar, M.Pd.  
NIP. 196705261995122001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah



Dr. Utsman, M.Pd.  
NIP.195708041981031006

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Palatihan Kecakapan Hidup Dalam Meningkatkan Perekonomian Eks Wts Di UPT Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri" telah dipertaharkan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Pendidikan Non Formal, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari

Rabu

Tanggal

10 Mei 2017

Panitia Ujian Skripsi,

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Edy Purwanto, M.Si

Bagus Kisworo, S.Pd, M.Pd

NIP 196807042005011001

NIP 196705261995122001

Penguji I

Drs. Ilyas, M.Ag

NIP 196606011988031003

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Utsman, M.Pd

Dr. Tri Suminar, M.Pd

NIP 195708041981031006

NIP 196705261995122001

UNNES  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

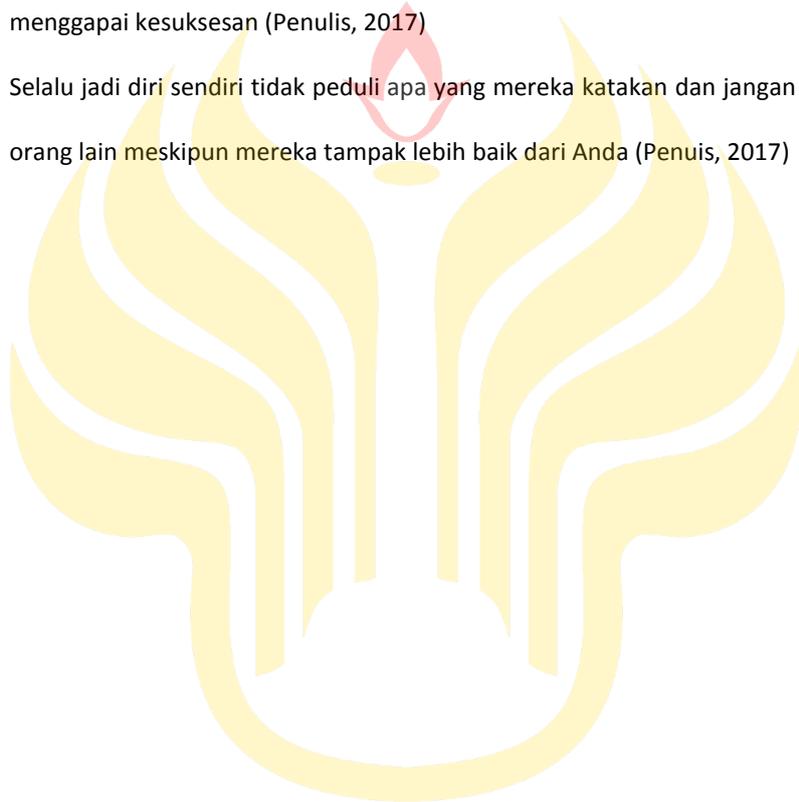
Semarang,

  
Ivarovich Putama Anandhi  
NIM. 1201411021

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## MOTTO

- ❖ Skripsi yang baik adalah skripsi yang bermanfaat bagi orang lain (Penulis, 2017)
- ❖ Kecerdasan bukanlah tolak ukur kesuksesan, tetapi dengan bekerja keras kita bisa menggapai kesuksesan (Penulis, 2017)
- ❖ Selalu jadi diri sendiri tidak peduli apa yang mereka katakan dan jangan pernah menjadi orang lain meskipun mereka tampak lebih baik dari Anda (Penulis, 2017)



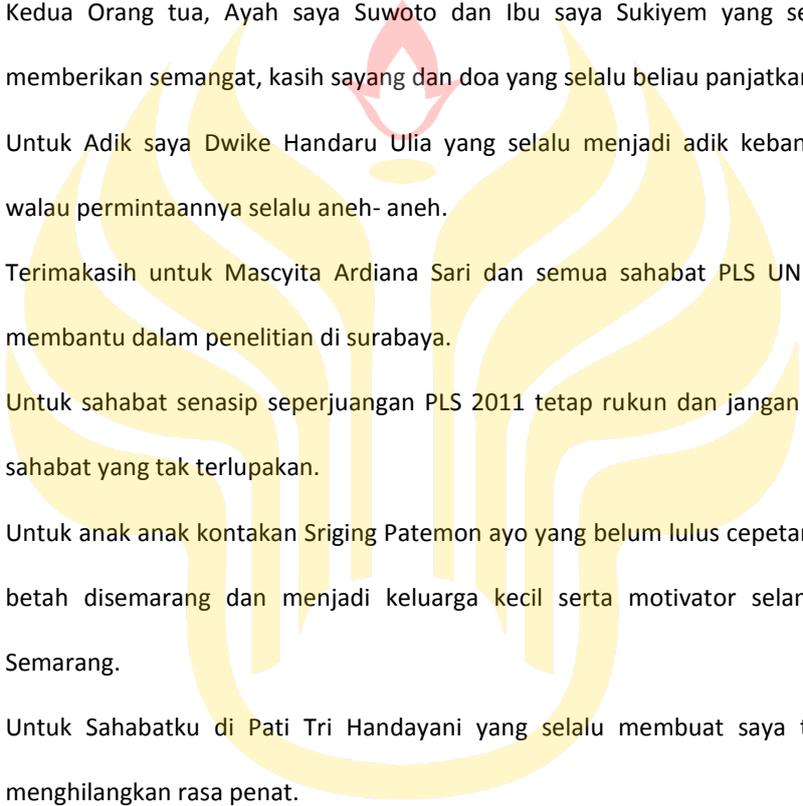
**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## PERSEMBAHAN

Atas Karunia dan Rahmat Allah SWT

Karya ini akan saya persembahkan untuk :

1. Kedua Orang tua, Ayah saya Suwoto dan Ibu saya Sukiyem yang senantiasa telah memberikan semangat, kasih sayang dan doa yang selalu beliau panjatkan untuk saya.
2. Untuk Adik saya Dwiki Handaru Ulia yang selalu menjadi adik kebanggan kakaknya walau permintaannya selalu aneh-aneh.
3. Terimakasih untuk Mascyita Ardiana Sari dan semua sahabat PLS UNESA 2010 yang membantu dalam penelitian di Surabaya.
4. Untuk sahabat senasip seperjuangan PLS 2011 tetap rukun dan jangan bosan menjadi sahabat yang tak terlupakan.
5. Untuk anak-anak kontak Sriging Patemon ayo yang belum lulus cepetan nyusul jangan betah di Semarang dan menjadi keluarga kecil serta motivator selama 4 tahun di Semarang.
6. Untuk Sahabatku di Pati Tri Handayani yang selalu membuat saya tersenyum dan menghilangkan rasa penat.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## ABSTRAK

**Anandhi, Ivanovich Utama.** 2017. *Palatihan Kecakapan Hidup Dalam Meningkatkan Perekonomian Eks Wts Di UPT Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri.* Skripsi. Jurusan Pendidikan Nonformal. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1 Dr. Utsman, M.Pd dan Pembimbing 2 Dr. Tri Suminar, M.Pd

**Kata kunci :** Pelatihan, Eks WTS, Bimbingan sosial, Peningkatan Perekonomian,

Praktik Prostitusi dikota besar sudah menjamur dimana begitupun Wanita tuna susila. Praktik prostitusi harus dihapus dan para Wanita tuna susila harus dibimbing supaya bisa diterima dimasyarakat kembali. Wanita tuna susila perlu mendapatkan bimbingan agar tidak terus menerus melakukan pekerjaan yang tidak bermoral. Banyak langkah- langkah dalam menanggulangi masalah wanita tuna. Melalui UPT RSTS Kediri, wanita tuna susila yang sudah direhab akan mendapat bimbingan dan pelatihan melalui program- program kegiatan yang telah dibuat oleh UPT RSTS Kediri. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui latar belakang sosial eks WTS di lokalisasi Betiring sampai mengikuti pelatihan, (2) mengetahui proses pelaksanaan pelatihan dalam upaya meningkatkan perekonomian yang ingin dicapai eks WTS di UPT Rehabilitasi Tuna Susila Kediri, (3) hal penunjang beserta hambatan yang dihadapi eks WTS di UPT Rehabilitasi Tuna Susila Kediri.

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian, dan mengambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan program di UPT RSTS Kediri dibuat oleh Kepala dan pegawai UPT RSTS Kediri, dan perencanaan program dibuat satu dalam sebelum kegiatan dimulai, tepatnya setiap bulan desember. Program tersebut ada keterampilan inti, keterampilan umum dan bimbingan- bimbingan fisik, sosial dan mental. Pelaksanaan program keterampilan umum, inti dan bimbingan- bimbingan tersebut dilakukan setiap hari senin sampai dengan kamis. Hasil dari adanya UPT RSTS Kediri berupa perubahan pada tingkah laku dan bakat atau potensi pada klien. Kendala yang di alami oleh UPT RSTS Kediri ialah berupa tingkah laku klien yang semaunya sendiri dan malas. Untuk upaya yang dilakukan UPT RSTS Kediri adalah berupa kasih sayang, tlaten, sabar dan ketegasan kepada klien.

Saran untuk UPT RSTS Kota Kediri seharusnya memperluas jangkauan dalam membimbing eks wanita tuna susila, jadi tidak hanya 60 orang saja yang di bimbing di dalam UPT RSTS Kediri. Karena masih banyak lagi para wanita tuna susila di Provinsi Jawa Timur, selain itu dalam membimbing klien seharusnya waktunya tidak dibatasi, seperti diberi waktu 4 bulan, waktu tersebut dalam memberi pengajaran klien dalam keterampilan dan bimbingan sangatlah kurang. Seharusnya UPT RSTS Kediri membebaskan klien setelah klien benar- benar sudah bias dipercaya bisa berubah dan tidak kembali lagi ke jalan yang negatif.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang berlimpah dan shalawat salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Palatihan Kecakapan Hidup Dalam Meningkatkan Perekonomian Eks Wts Di UPT Rehabilitasi Tunas Susila Kediri”*** dengan lancar. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan di Universitas Negeri Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun telah banyak menerima bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini dengan hati yang tulus penyusun menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan pada penyusun untuk menyelesaikan studi di Program Studi Pendidikan Non Formal.
2. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin penelitian.
3. Dr. Utsman, M.Pd, Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah memberikan ijin dan persetujuan terhadap judul skripsi yang penulis ajukan.
4. Dosen Pembimbing 1 Dr. Utsman, M.Pd. dan Dosen Pembimbing 2 Dr. Tri Suminar, M.Pd yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan

membimbing penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Segenap Dosen Jurusan Pendidikan Non Formal yang telah senantiasa menyampaikan ilmunya kepada penulis dan kawan-kawan.
6. Bapak Suwoto dan Ibu Sukiyem yang senantiasa memberikan nasihat dan mendukung dalam menyusun skripsi.
7. Satu satunya adik saya Dwiki Handaru Ulia yang sering membawa keceriaan dikeluarga.
8. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Atas kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang dan karunia-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca.

Semarang,

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Penulis

## DAFTAR ISI

hal

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Diferensi Kecakapan Hidup.....	12
1.6. Pembatasan Masalah.....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1. Wanita Tuna Susila (WTS) Sebagai Seks Komersial.....	14

2.1.1. Diferensi Pelacuran .....	14
2.1.1.1. Diferensi Prostitusi dan Promiskuitas .....	15
2.1.1.2. Seks Bebas, Cinta Bebas dan Pelacuran .....	19
2.1.1.3. Penyebab Timbulnya Pelacuran .....	22
2.2. Dampak Sosial Masyarakat Terhadap Keberadaan Lokalisasi .....	23
2.2.1. Pandangan Masyarakat Terhadap Eks Lokalisasi .....	23
2.3. Bimbingan Sosial Dalam Pendidikan Non Formal .....	25
2.3.1. Pengertian Bimbingan Sosial .....	25
2.3.2. Perencanaan dan Pengintegrasian Masyarakat .....	29
2.3.3. Bimbingan masyarakat Sosial Proses Pekerjaan Sosial .....	32
2.4. Hubungan Wanita Tuna Susila, Pelatihan Kecakapn Hidup, Bimbingan Sosial Dan Pendidikan Luar Sekolah .....	35
2.4.1. Teori Pelatihan Life Skill .....	37
2.4.2. Pengertian Pendidikan Kecakapan Hidup .....	39
2.4.3. Tujuan Pendidikan Luar Sekolah .....	42
2.4.4. Fungsi Pendidikan Luar Sekolah .....	42
2.4.5. Ciri- Ciri Pendidikan Luar Sekolah .....	43
2.4.6. Lingkup Pendidikan Luar Sekolah .....	45
2.4.7. Teori Pull dan Push .....	53
2.4.8. Penelitian Terdahulu .....	56
2.4.9. Grafik Berfikir .....	59

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Pendekatan Penelitian .....	60
3.2. Tempat Penelitian .....	61
3.3. Sumber Data .....	61
3.3.1. Sumber Data Primer .....	62
3.3.2. Sumber Data Sekunder .....	62
3.4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data .....	62
3.4.1. Wawancara .....	63
3.4.2. Observasi .....	64

3.4.3. Dokumentasi .....	65
3.5. Instrumen .....	67
3.5.1. Pengalaman Berperan Serta .....	67
3.5.2. Manusia Sebagai Instrumen Pelatihan .....	67
3.6. Teknik Analisis Data .....	68
3.6.1. Reduksi Data .....	69
3.6.2. Display Data .....	69
3.6.3. Verifikasi dan Simpulan Data .....	70
3.7. Kriteria Keabsahan Data .....	71
3.7.1. Kredibilitas .....	71
3.7.2. Kriteria Keabsahan Data .....	72
3.7.3. Konfirmabilitas .....	73
3.7.4. Transferabilitas .....	74

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

4.1. Latar Belakang Sosial EKS WTS di Lokalisasi Betiring sampai mengikuti pelatihan .....	75
4.1.1. Sejarah Berdirinya Lokalisasi Betiring .....	75
4.1.2. Proses Sampai Menjadi WTS di Lokalisasi Betiring .....	76
4.1.3. Eks WTS Samapai Mengikuti Pelatihan .....	80
4.2. Proses Pelaksanaan Pelatihan Yang Ingin Dicapai Eks WTS di UPT RSTS Kediri .....	80
4.2.1. Sejarah Berdirinya .....	80
4.2.2. Pola Pelaksanaan Program Rehabilitasi .....	84
4.2.3. Struktur Organisasi UPT RSTS .....	86
4.2.4. Tenaga Pengelola dan Pendidik .....	87
4.2.5. Fasilitas, Sarana dan Prasarana .....	88
4.2.6. Kurikulum .....	89
4.2.7. Bentuk Kepelatihan .....	90
4.2.8. Model Kepelatihan .....	91
4.2.9. Proses Kepelatihan .....	92

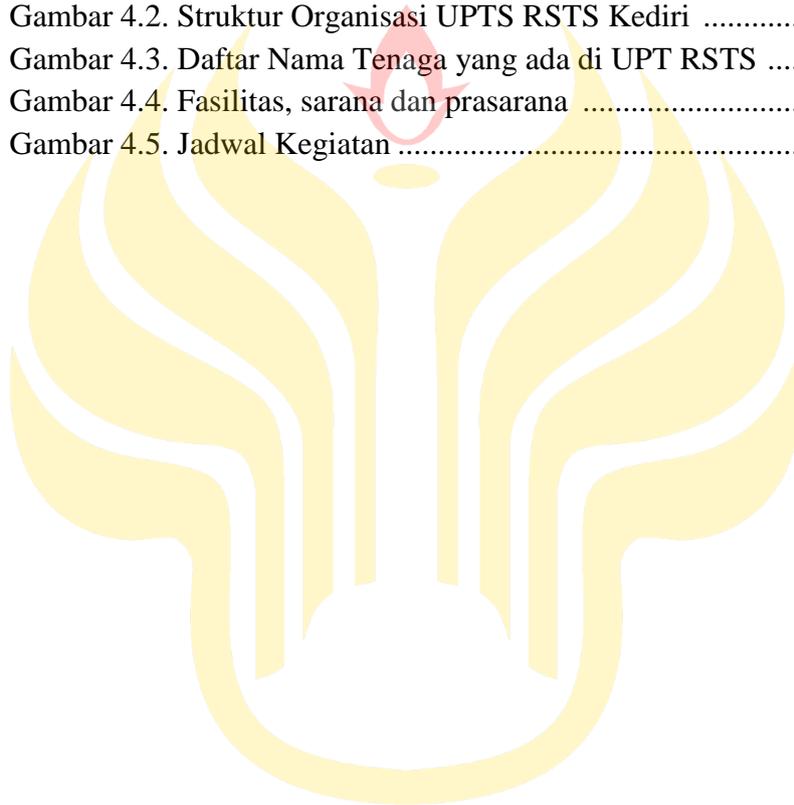
4.2.9.1. Pelatihan Menjahit .....	93
4.2.9.2. Pelatihan Merias .....	97
4.2.9.3. Pelatihan Memasak Tataboga .....	100
4.2.10. Lulusan dan hasil .....	107
4.3. Faktor Pendukung Beserta Penghambat Pelaksanaan Pelatihan .....	114
<b>BAB V KESIMPULAN</b>	
5.1. Kesimpulan .....	120
5.2. Saran .....	122
DAFTAR PUSTAKA .....	124
LAMPIRAN .....	



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR TABEL

	hal
1. Gambar 2.1. Kerangka Berfikir.....	59
2. Gambar 4.1. Daftar Lembaga.....	82
3. Gambar 4.2. Struktur Organisasi UPTS RSTS Kediri .....	86
4. Gambar 4.3. Daftar Nama Tenaga yang ada di UPT RSTS .....	87
5. Gambar 4.4. Fasilitas, sarana dan prasarana .....	88
6. Gambar 4.5. Jadwal Kegiatan .....	107



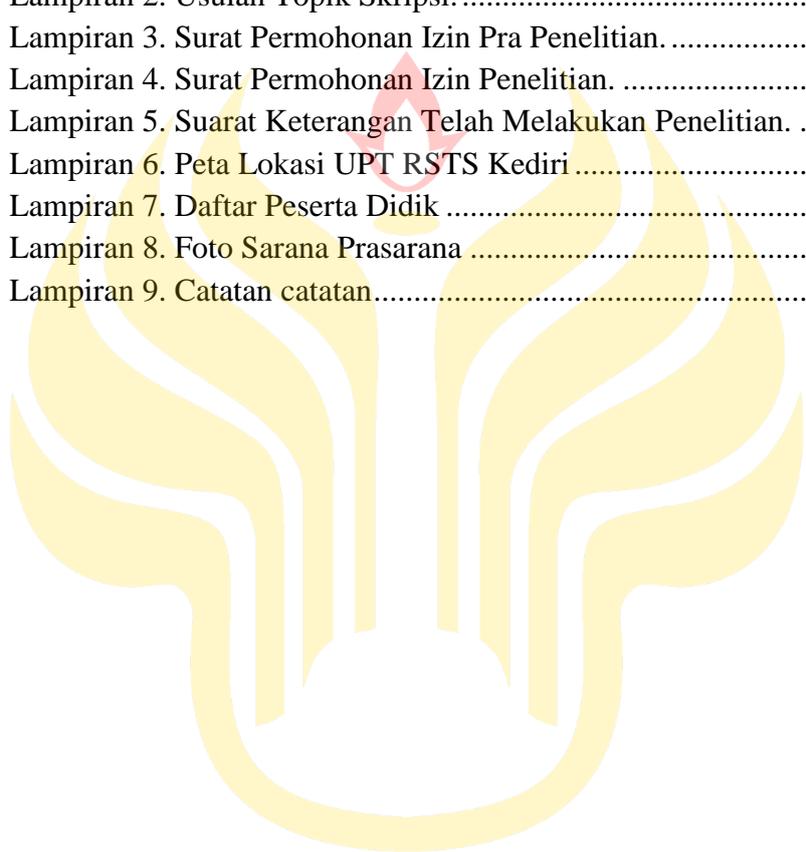
**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR GAMBAR

	hal
1. Gambar 4.1. Tampak Depan UPT RSTS Kediri .....	89
2. Gambar 4.2. Salah Satu Program Pelatihan untuk klien .....	90
3. Gambar 4.3. Salah Satu Program Pelatihan untuk klien .....	96
4. Gambar 4.4. Hasil Pelatihan Merias .....	99
5. Gambar 4.5. Hasil Pelatihan Kue Nastar .....	102
6. Gambar 4.6. Hasil Pelatihan Kue Putri Salju .....	103
7. Gambar 4.7. Salah Satu Program Pelatihan untuk klien .....	105
8. Gambar 4.8. Klien sedang mengikuti praktik pelatihan.....	106
9. Gambar 4.9. Kondisi lingkungan bekas lokalisasi .....	108
10. Gambar 4.10. Warung kelontong yang dimiliki para klien.....	111
11. Gambar 4.11. warung yang berada dilokalisasi betiring.....	112
12. Gambar 4.12. Pemberian materi bimbingan sosial dinamika kelompok.....	114
13. Gambar 4.13. Evaluasi pengelola dengan bekas klien.....	118

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Suarat Keterangan Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi .....	127
2. Lampiran 2. Usulan Topik Skripsi.....	128
3. Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Pra Penelitian.....	129
4. Lampiran 4. Surat Permohonan Izin Penelitian.....	130
5. Lampiran 5. Suarat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	131
6. Lampiran 6. Peta Lokasi UPT RSTS Kediri.....	132
7. Lampiran 7. Daftar Peserta Didik .....	133
8. Lampiran 8. Foto Sarana Prasarana .....	135
9. Lampiran 9. Catatan catatan.....	136



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Praktik prostitusi menjadi salah satu persoalan utama yang membutuhkan suatu penanganan serius oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah tanpa mengabaikan pencegahan dan perbaikannya dalam kehidupan masyarakat terutama di kota besar. Hal ini merupakan sebuah pola bertahan hidup bagi sebagian masyarakat dalam menyikapi kerasnya kehidupan melalui pekerjaan yang berpengaruh buruk bagi kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, keberadaan praktik prostitusi tetap menjadi eksploitasi seks yang dikomersialisasikan oleh sebagian kepentingan orang yang disebut mucikari atau germo dengan mempekerjakan para pelaku seks yaitu pelacur (masyarakat Gresik menyebutnya “balon”) yang kemudian “diperhalus” menjadi Wanita Tuna Susila (WTS) atau wanita harapan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Profesi pelacuran menurut Kartini Kartono (2011) merupakan profesi yang sangat tua usianya, setara kehidupan manusia itu sendiri. Pelacuran juga sebagai transaksi bisnis yang disepakati oleh pihak yang terlibat sebagai sesuatu yang bersifat kontrak jangka pendek yang memungkinkan satu orang atau lebih mendapatkan kepuasan seks demi imbalan uang (Koendjoro, 2004:30). Tidak hanya itu, wanita tuna susila

(WTS) merupakan sebuah profesi yang diartikan kurang beradab dan dianggap dapat mendatangkan penyakit oleh pemikiran masyarakat secara awam. Namun, disayangkan bahwa keberadaan pelacur yang kebanyakan wanita di bawah umur terjadi di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Data statistik di daerah Betiring menunjukkan bahwa kurang lebih 75% dari jumlah pelacur yang ada di lokasi tersebut adalah wanita-wanita muda di bawah umur 30 tahun. Mereka itu pada umumnya memasuki dunia pelacuran pada usia yang terbilang remaja, yaitu 13—24 tahun. Akan tetapi yang paling banyak adalah usia 17-21 tahun. Banyaknya gadis muda yang terjerumus dalam lembah hitam disebabkan beberapa faktor: (1) pernah mengalami pelecehan seksual sehingga trauma dan benci terhadap laki-laki, (2) ditinggal suami dalam keadaan hamil, (3) berasal dari keluarga yang memiliki sejarah hidup sebagai PSK yang memiliki daya seks tinggi, dan (4) tuntutan kebutuhan ekonomi yang serba kekurangan. Dari beberapa faktor tersebut faktor yang paling utama adalah faktor ekonomi karena faktor ekonomi salah satu faktor yang sering dijadikan alasan untuk bekerja sebagai PSK (Hasil wawancara dengan mantan WTS yang berada di lokasi Betiring bernama RL, KT, IM, dan SL pada tanggal 26 April 2014).

Wanita-wanita muda yang bekerja sebagai PSK di Lokasi Betiring pada umumnya berasal dari keluarga tidak mampu. Orang tua mereka bekerja sebagai petani. Para PSK menginginkan kehidupan serba kecukupan sehingga dapat membeli barang seperti pakaian, telepon

genggam, dan kebutuhan lainnya. PSK tersebut bermula bekerja sebagai penari atau penghibur acara di desa, dengan berjalannya waktu Lokalisasi Betering terkenal sebagai tempat hiburan.

Keberadaan PSK di tempat prostitusi tetap tidak mengubah stigma yang buruk akibat tindakan-tindakan amoral seksual yang berupa relasi seksual terang-terangan tanpa malu, sangat kasar, dan provokatif dalam berhubungan seksual dan dilakukan dengan banyak pria tanpa rasa maupun ikatan yang mengikat layaknya pernikahan

Pelacuran merupakan profesi tertua di dunia yang nampaknya sulit dihilangkan selama hukum penawaran dan permintaan tetap berlaku untuk melegitimasi ruang gerak pelacuran. Semua itu tetap tidak banyak berarti mencegah makin menjamurnya praktik-praktik prostitusi (Bagong, Suryanto 1997:45).Makin maraknya praktik prostitusi yang legal maupun ilegal membuat pemerintah melakukan tindakan khusus dan tegas dengan penertiban secara bertahap sehingga berujung dengan penutupan prostitusi tersebut. Hal ini juga bisa menjadi tindakan yang efektif dan komprehensif, namun bisa juga terjadi sebaliknya. Sebagaimana yang terjadi pada praktik prostitusi Betering yang berlokasi di Jl. Banjar Sari Cerme-Gresik, penutupan praktik prostitusi tersebut patutdilakukan. Tindakan tegas Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap penutupan lokalisasi merupakan bagian dari penanganan penataan kota dan kehidupan sosial. Penutupan lokalisasi pada 08 Agustus 1993 adalah

implementasi<sup>1</sup> dari usaha Pemerintah Kabupaten Gresik. Pada tahun 2002 Pemda mengeluarkan Perda No. 15 tahun 2002 yang direvisi dengan Perda No. 19 tahun 2004 tentang larangan peredaran minuman keras, dan Perda No. 7 tahun 2002 yang direvisi Perda No 22 tahun 2004 tentang larangan pelacuran dan perbuatan cabul yang meresmikan penutupan praktik prostitusi Betiring, Gresik (Surabaya pagi.com/ Kamis 03 Oktober 2013). Lokalisasi di Kecamatan Betiring didominasi oleh PSK yang didominasi oleh usia dewasa awal yaitu usia 13—24 yang merupakan usia produktif yang seharusnya memiliki potensi terhadap bangsa dan negara. Mereka bisa juga disebut aset bangsa karena usia produktif merupakan sumber daya manusia yang dapat menghasilkan barang dan jasa yang dapat menyumbang *product domestik bruto* (pdb).

Dalam proses sterilisasi Kota Gresik, pemerintahan daerah utamanya mengedepankan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat Gresik secara keseluruhan. Akan tetapi, terkadang sasaran utama tidak bisa diraih secara maksimal. Dari penutupan praktik prostitusi tersebut, muncul masalah bagi masyarakat sekitar Betiring yang mengandalkan hidup dari praktik prostitusi. Dampak yang bisa dirasakan adalah susahya mengembalikan stabilitas ekonomi keluarga akibat penutupan tersebut. Tidak hanya itu, hal yang paling memungkinkan adalah meningkatnya kriminalitas seperti minuman keras yang berada di sekitar Betiring yang lebih banyak meresahkan warga setempat.

---

Berdasarkan fenomena sosial diatas, persoalan-persoalan itu menjadi penting untuk diungkap. Adapun latar belakang penelitian ini didasari oleh beberapa alasan sebagai berikut.

1. Meskipun kawasan prostitusi Betiring sudah ditutup hampir 10 tahun yang lalu, berdasarkan Perda No. 22 tahun 2004, dampak sosial ekonomi masih dirasakan warga masyarakat setempat hingga saat ini karena dari segi penghasilan ekonomi mengalami penurunan yang cukup signifikan, terutama mereka yang memiliki pekerjaan yang berkaitan secara langsung dengan praktik-praktik prostitusi, seperti: para mucikari, pedagang keliling, satpam, tukang parkir, tukang cuci pakaian, tukang pijat, tukang masak, warung makan dan lain sebagainya.

2. Pemerintah Kabupaten Gresik tampaknya masih kesulitan mengembalikan kawasan Betiring sebagai daerah yang bebas dari prostitusi karena adanya stigmatisasi yang sudah telanjur diberikan oleh masyarakat sebagai “daerah hitam” sehingga diperlukan upaya yang serius dan bimbingan sosial yang terus menerus, baik kepada eks WTS maupun masyarakat sekitar.

3. Tidak mudah untuk menjadikan eks WTS menjadi “wanita baik-baik” karena diperlukan berbagai pendekatan, baik pendekatan sosial ekonomi, psikologis, maupun religius, agar menjadi ”wanita normal” dan produktif.

4. Disamping dampak ekonomi, penutupan lokalisasi Betiring juga berdampak pada aspek sosial dengan ditutupnya “satu daerah hitam”. Dengan demikian sangat memungkinkan akan tumbuh “daerah-daerah hitam” yang lain sebagai akibat dari penutupan lokalisasi tersebut. Apabila masalah ini tidak ditangani, maka dampak sosialnya akan jauh lebih luas, yakni menyebabkan praktik-praktik “prostitusi gelap” dan tersebarnya berbagai kawasan sosial seperti: kriminalitas kenakalan remaja, narkoba, dan tersebarnya penyakit kelamin dan AIDS.

Kawasan bekaspraktik prostitusi akan diasumsikan tempat yang sulit berkembang karena pencitraan yang buruk sebelumnya. Hal itu bisa terjadi karena infrastruktur yang kurang layak di daerah Betiring yang merupakan daerah pinggiran kota Gresik. Tidak hanya itu, para eks WTS pun mengalami kesulitan untuk kembali berinteraksi dengan masyarakat sekitar sebagai manusia normal yang membutuhkan kehidupan sosial yang wajar dan ruang gerak untuk kehidupan selanjutnya.

Tahun 2015 kehidupan lokalisasi WTS di Betiring cenderung sepi karena sejak bulan November 2014 awal sering diadakan razia oleh Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kabupaten Gresik. Saat ini daerah tersebut masih terdapat warung- warung yang lebih dikenal dengan istilah warung pangku. Warung pangku merupakan warung yang memberikan pelayanan lebih yang dimaksudkan adalah menyediakan tempat pelanggan untuk memuaskan hasrat seksualnya. Keberadaan warung pangku sangat

meresahkan masyarakat setempat karena pada dasarnya warung pangku menjadi "kedok" barubagi WTS dalam beroperasi.

Adanya fenomena warung pangku tersebut sangat berpengaruh pada lingkungan masyarakat karenaakan menambah citra buruk tempat tersebut. Oleh karena itu perlu adanya pendekatan edukatif yang berbasis pada kebutuhan subjek didik, dalam hal ini WTS maupun pemerintah Kabupaten Gresik dalam menangani masalah sosial di daerahnya seperti pendidikan nonformal melalui bimbingan sosial dan pelatihan terhadap mantan WTS. Pendidikan nonformal ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis, diluar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu didalam mencapai tujuan belajarnya (Sudjana, 2004:22).

Pendidikan nonformal memiliki tujuan dan kegiatan yang terorganisasi, diselenggarakan dilingkungan masyarakat dan lembaga-lembaga untuk melayani kebutuhan belajar khusus peserta didik. Dalam penelitian ini, pendidikan nonformal diarahkan kepadamantan WTS. Dalam hal ini pemberian pelatihan keterampilan disesuaikan dengan kebutuhan mantanWTS dan pemberian bimbingan sosial.

Potensi yang dimilikieks WTS memungkinkan untuk diberi pelatihan keterampilan,wawasan, dan penguasaan keterampilan baru atau tambahan sebagai bekal di dunia kerja. Pelatihanakanberjalansesuai yang diinginkanbiladidukung minat eks WTS. Pelatihan yang diberikan yaitu:

menjahit, tata rias, dan tata boga. Bimbingan sosial yang diberikan berupa bimbingan keagamaan, mental, dan spiritual (Dinas Sosial Kabupaten Gresik).

Setiap individu memiliki motivasi yang berbeda-beda dalam meningkatkan kemampuan. Pelatihan keterampilan mempunyai tujuan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki individu, sehingga dapat diaplikasikan pada dunia kerja serta dapat bermanfaat untuk diri sendiri maupun dalam masyarakat. Diharapkan mantan WTS tidak kembali bekerja di tempat prostitusi. Pelatihan dan bimbingan sosial yang sudah diberikan kepada eks WTS merupakan bekal untuk diterapkan dalam kehidupan baru mereka. Simpulannya perbaikan diri sendiri dan perekonomian yang lebih baik merupakan tujuan program penelitian ini. Tanggapan merupakan suatu reaksi stimulus yang terjadi dalam interaksi antara pelakunya dengan mendapatkan rangsangan dari suatu perilaku yang memicu individu atau kelompok untuk bersikap baik atau buruk itu dengan tindakan. Dalam masyarakat terjadi proses interaksi sosial. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memiliki dua syarat yaitu, adanya kontak sosial dan komunikasi. Tanggapan masyarakat merupakan suatu reaksi masyarakat dalam berinteraksi sosial antara Mantan WTS dan masyarakat dengan mendapat suatu perilaku yang memicu bersikap baik atau buruk dengan tindakan atau tanpa tindakan terhadap eks WTS di lokasi. Terdapat dua tanggapan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi. Pendapat tersebut terdiri atas pendapat positif

dan negatif. Pendapat positifnya adalah masyarakat sekitar lokalisasi merasa senang dengan adanya penutupan karena masyarakat tidak merasa resah lagi. Sedangkan segi negatifnya adalah keberadaan praktik prostitusi sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat sekitar (menurut St pedagang klontong) dan masyarakat sekitar lokalisasi merasa resah dengan adanya warung pangku karena berpengaruh kepada berubahnya pola pikir, sikap, dan kehidupan sosial mereka.

Aktivitas sosial- ekonomi yang ada di lokalisasi Betiring seperti halnya masyarakat biasa tidak tampak seperti daerah lokalisasi. Masyarakat sekitar bermatapencapaian sebagai wirausahawan dengan cara membuka usaha toko, berternak ayam, sapi dan kambing, dan usaha warung kopi yang biasa disebut warung pangku. Stigma masyarakat sekitar lokalisasi Betiring bermacam- macam. Masyarakat yang membuka warung pangku tidak merasakan keresahan karena mereka mendapatkan keuntungan dari usaha yang mereka dirikan. Sedangkan bagi masyarakat sekitar yang tidak memiliki usaha merasa resah karena mereka merasa terganggu dengan adanya warung pangku. Keresahan itu terjadi pada saat Satpol PP mengadakan razia terhadap warung pangku yang beroperasi selama 24 jam. Biasanya Satpol PP melakukan razia sewaktu- waktu. Ketika razia tersebut dilakukan dihari, ketenangan warga sekitar yang sedang beristirahat dapat terganggu.

Dampak yang terjadi setelah penutupan lokalisasi Betiring terlihat sangat signifikan karena para mantan WTS tetap beroperasi secara terselubung melalui usaha warung pangku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas,berbagai fenomena di daerah Betiring menarik untuk diteliti. Kajian dan penelitian yang dilakukan berkaitan dengan upaya dinas sosial dalam memberikan model bimbingan sosial terhadap mantan WTS setelah praktik prostitusi di lokalisasi Betiring resmi ditutup.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah

- 1) Bagaimana latar belakang sosial eks WTS di lokalisasi Betiring sampai mengikuti pelatihan ?
- 2) Bagaimana proses pelaksanaan pelatihan yang ingin dicapai eks WTS di UPT Rehabilitasi Tuna Susila Kediri?
- 3) Faktor pendukung beserta penghambat pelaksanaan yang dihadapi eks WTS di UPT Rehabilitasi Tuna Susila Kediri?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah

- 1) Mendiskripsikan latar belakang sosial eks WTS Betiring sampai mengikuti pelatihan di UPT Rehabilitasi Tuna Susila Kediri;
- 2) Mendiskripsikan proses pelaksanaan pelatihan dalam upaya meningkatkan perekonomian yang ingin dicapai eks WTS di UPT Rehabilitasi Tuna Susila Kediri;

- 3) Mendiskripsikan hal penunjang beserta hambatan yang dihadapi eks WTS di UPT Rehabilitasi Tuna Susila Kediri;

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis :**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan kajian tentang pengaruh pelatihan kecakapan hidup dalam meningkatkan perekonomian eks WTS.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan gambaran kehidupan lokalisasi Betiring beserta pelatihan di UPT Rehabilitasi Tuna Susila. Di samping itu hasil penelitian ini dapat memberikan pencerahan pemikiran dalam mengaplikasikan wawasan ilmu sosial ketika terjun ke masyarakat secara langsung.

###### **b. Bagi pembaca**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemaparan mengenai bentuk lokalisasi berdasarkan bentuk realitas yang penuh stigma dan juga realitas yang bersih dari nilai-nilai yang merusak realitas itu sendiri.

###### **c. Bagi lembaga :**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah keilmuan mengenai dampak penutupan lokalisasi terhadap aspek sosial-ekonomi masyarakat di sekitar lokalisasi.

### 1.5. Definisi Kecakapan Hidup

Dampak sosial adalah merupakan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan disuatu wilayah atau area tertentu. Dampak sosial suatu perubahan sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat baik positif maupun negatif. Dalam hubungannya dengan penelitian ini dampak sosial yang dimaksud adalah segala hal yang terjadi di lingkungan masyarakat yang tinggal disekitar bekas lokalisasi yaitu perubahan pola pikir, sikap, kehidupan sosial, dan ekonomi. Model Bimbingan sosial merupakan pemberian bimbingan kepada individu agar mampu memecahkan permasalahan pribadi dan sosial secara mandiri. Model bimbingan sosial yang diberikan kepada eks WTS yaitu dengan memberikan bimbingan keagamaan, bimbingan keterampilan, dan pelatihan untuk berwirausaha. Pemberian bimbingan sosial diberikan kepada Eks WTS yang berada di Rehabilitasi Tuna Susila Kediri.

Tanggapan merupakan interaksi antar pelaku, Tanggapan bias berwujud tindakan atas rangsangan yang memicu perilaku individu atau kelompok. Tindakan yang dilakukan bisa bersikap baik atau buruk. Dalam masyarakat terjadi proses interaksi sosial. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memiliki dua syarat yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Tanggapan masyarakat merupakan suatu reaksi masyarakat dalam interaksi sosial antara mantan WTS dan masyarakat yang berbentuk perilaku yang memicu masyarakat untuk bersikap baik

atau buruk dengan tindakan atau tanpa tindakan terhadap Mantan WTS di lokalisasi.

#### **1.6. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah lebih terfokuskan kepada segi objek, tujuan, dan pelaksanaan agar dapat terhindar dari kekeliruan penafsiran antara penulis dan pembaca dalam memahami isi penelitian “PELATIHAN KECAKAPAN HIDUP DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN EKS WTS DI UPT REHABILITASI TUNA SUSILA DI KEDIRI”. Adapun batas penelitian ini sebagai berikut.

1. Penelitian hanya membahas latar belakang sosial Eks WTS di lokalisasi Betiring, Cerme-Gresik.
2. Penelitian membahas tentang proses pelaksanaan pelatihan yang ingin dicapai Eks WTS di UPT Rehabilitasi Tuna Susila Kediri.
3. Penelitian hanya mengulas faktor pendukung beserta penghambat pelaksanaan pelatihan dan model bimbingan dinas sosial di UPT Rehabilitasi Tuna Susila Kediri.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Wanita Tuna Susila (WTS) Sebagai Pekerja Seks Komersial

##### 2.1.1. Definisi Pelacuran

Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan. Pelacuran berasal dari bahasa latin *prostituere* atau *pro-stauree*, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan. Sedangkan *prostitue* adalah pelacuran atau sundal. Sebutan atau label itu dikenal pula dengan istilah WTS (wanita tuna susila).

Parkins dan Bennet (dalam Koendjoro, 2004:30) mendefinisikan pelacuran sebagai transaksi bisnis yang disepakati oleh pihak yang terlibat sebagai sesuatu yang bersifat kontrak jangka pendek yang memungkinkan satu orang atau lebih mendapatkan kepuasan seks demi imbalan uang.

Pelacuran merupakan profesi yang sangat tua usianya berupa tingkah laku lepas bebas tanpa kendali dan cabul karena adanya pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas-batas kesopanan. Pelacuran itu selalu ada pada semua negara berbudaya, sejak zaman purba sampai sekarang. Pelacuran senantiasa menjadi masalah sosial dan menjadi objek urusan hukum dan tradisi.

Tunasusila atau tindak asusila itu diartikan sebagai tindakan kurang beradab karena penyerahan relasi seksualnya kepada banyak laki-laki untuk pemuasan seksual dan mendapat imbalan jasa atau uang bagi pelayanannya. Tuna susila itu juga bisa diartikan sebagai salah tingkah gagal menyesuaikan diri terhadap norma-norma susila. Dengan demikian pelacuran adalah tindakan wanita yang tidak pantas kelakuannya dan bisa mendatangkan masalah atau celaka dan penyakit, baik kepada orang lain yang bergaul dengan dirinya, maupun kepada diri sendiri.

#### **2.1.1.1. Definisi Prostitusi dan Promiskuitas**

1. Menurut W.A Bonger (dalam Kartini Kartono, 2011:213) prostitusi ialah gejala kemasyarakatan yang ditandai dengan wanita yang menjual diri dengan melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Pada definisi ini jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai profesi atau mata pencaharian sehari-hari dengan jalan melakukan relasi-relasi seksual.
2. P.J. de Bruine Van Amstel (2011:214) menyatakan bahwa prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran. Adanya unsur-unsur ekonomis dan penyerahan diri wanita dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus dengan banyak laki-laki.

Peraturan Pemerintah Daerah DKI Jakarta Raya tahun 1967 mengenai penanggulangan masalah pelacuran menyatakan bahwa pelacuran merupakan wanita tunasusila yang mempunyai kebiasaan melakukan hubungan kelamin di luar

perkawinan, baik imbalan jasa maupun tidak. Sedangkan peraturan pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat untuk melaksanakan pembatasan dan penerbitan masalah pelacuran menyatakan “Pelacur, yang selanjutnya disingkat P, adalah mereka yang biasa melakukan hubungan kelamin diluar pernikahan yang sah”. Kedua peraturan tersebut menekankan pada masalah hubungan kelamin di luar pernikahan, baik dengan mendapatkan imbalan maupun tidak. Sedangkan Pasal 296 KUHP mengenai prostitusi menyatakan “barang” siapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya seribu rupiah.

Pada peristiwa pelacuran ada dorongan-dorongan seks yang tidak terintegrasi dengan kepribadian. Artinya, impuls-impuls seks tidak terkendali oleh hati nurani. Selanjutnya dengan menggunakan teknik-teknik seksual yang amat kasar dan provokatif dalam sanggama dan sangat impersonal karena berlangsung tanpa afeksi tanpa perasaan, emosi, dan kasih sayang sehingga dilakukan dengan cepat dan tanpa orgasme pada pihak wanita atau pelacurnya.

Eksploitasi seks berarti penghisapan atau penggunaan serta pemanfaatan relasi seks semaksimal-maksimalnya oleh pihak pria. Sedang komersialisasi seks berarti perdagangan seks dalam bentuk penukaran kenikmatan seksual dengan benda-benda, materi, dan uang. Dalam pelacuran ini terdapat pelampiasan nafsu-nafsu seks secara bebas dengan banyak pria atas perjanjian pemberian keuntungan pada kedua belah pihak atau para pelakunya. Perbuatan melacurkan diri dilakukan baik sebagai kegiatan sambilan atau pengisi waktu senggang

(*amateurisme*), maupun sebagai pekerjaan penuh atau profesi. Wanita pelacur disebut dalam bahas asingnya *prostitut* sedang penalaran kasarnya ialah sundal, balon, lonte. Pada tahun 60- an oleh beberapa pihak terutama para petugas dinas sosial, digunakan istilah *eufemistis* untuk memperhalus artinya, yaitu tunasusila, sedangkan pelacur pria disebut gigolo.

Dengan adanya unsur komersialisasi dan barter seks perdagangan tukar menukar seks dengan benda bernilai maka pelacuran merupakan profesi yang paling tua sepanjang sejarah kehidupan manusia. Pelacuran dimasukkan dalam kategori sebagai berikut.

1. Pergundikan: pemeliharaan istri tidak resmi, istri gelap atau perempuan piaraan. Mereka hidup sebagai suami istri, namun tanpa memiliki ikatan perkawinan.
2. Tante girang atau *loose married woman*: yaitu wanita yang sudah kawin, namun tetap melakukan hubungan erotik dan seks dengan laki-laki lain baik secara iseng untuk mengisi waktu kosong, bersenang-senang, dan mendapatkan pengalaman seks lain.
3. Gadis-gadis panggilan: gadis-gadis dan wanita-wanita biasa yang menyediakan diri untuk dipanggil dan dipekerjakan sebagai *prostitut*, melalui saluran-saluran tertentu.
4. Gadis-gadis bar atau *B-girls*: yaitu gadis-gadis yang bekerja sebagai pelayan-pelayan bar sekaligus bersedia memberikan pelayanan seks kepada para pengunjung.

5. Gadis-gadis *juvenile delinquent*: yaitu gadis-gadis muda dan jahat, yang didorong oleh ketidakmatangan emosinya dan retardasi atau keterbelakangan intelegnya sehingga menjadi sangat pasif dan sugestibel sekali, karakternya sangat lemah.
6. Gadis-gadis binal atau *free girl*: merupakan gadis-gadis sekolah atau putus sekolah, putus studi di akademi atau fakultas dengan pendirian yang “brengek” dan menyebarkan kebebasan seks secara ekstrem.
7. Gadis-gadis taxi: yaitu wanita-wanita yang ditawarkan dibawa ke tempat “plesiran” dengan taksi-taksi atau becak.
8. Penggali emas atau *gold diggers*: yaitu gadis-gadis dan wanita-wanita cantik, ratu-ratu kecantikan, pramugari atau *mannequin*, penyanyi, pemain panggung, bintang film, pemain sandiwara teater atau opera, anak wayang dan lain-lain yang pandai merayu dan bermain cinta untuk mengeduk kekayaan orang-orang berduit. Pada umumnya mereka sulit diajak untuk bermain seks..
9. *Hostes* atau pramuria menyemarakkan kehidupan malam dalam *night club* (vide *EL Ci Ci, Miras, Nirwana, Golden gate, Bina Ria, Mini Disco, Tanamur* di Jakarta). Pada intinya, profesi *hostes* merupakan bentuk pelacuran halus.
10. Promiskuitas/ *promiscuity*: hubungan seks secara bebas dan *awut-awutan* dengan pria manapun juga, biasanya dilakukan dengan banyak laki-laki.

Promiskuitas itu merupakan tindak seksual yang amoral karena sangat tidak susila, terang-terangan secara terbuka tanpa *tedeng aling-aling*, sangat kasar, mencolok mata, dilakukan dengan banyak laki-laki, sehingga ditolak masyarakat. Orang-orang yang suka bertingkah laku amoral itu mempunyai ciri khas yaitu: 1) kurang terkendalnya rem-rem psikis dan, 2) melemahnya sistem pengontrol diri sehingga tidak atau kurang adanya pembentukan karakter mereka. Promiskuitas ini juga dilakukan tanpa disertai rasa malu sedikitpun. Biasanya tindakan ini didorong oleh nafsu-nafsu seks yang tidak wajar atau tidak matang tidak dewasa. Sifatnya tidak jauh beda dengan praktik pelacuran.

Wanita yang melakukan perbuatan-perbuatan *promiscuous* disebut sebagai *amatrice*; laki-lakinya disebut sebagai *amateur* atau Don Juan. Pelaku seks bebas tidak mendapatkan kepuasan seks sebab mereka biasanya didorong oleh libido atau impuls seksual yang abnormal, yang sangat kuat, bahkan sering lebih kuat daripada dorongan seks orang normal. Promiskuitas mengakibatkan mental menjadi sangat labil dan menumbuhkan sikap tidak bertanggung jawab. Promiskuitas memupuk pola hidup semau sendiri, tanpa kendali, dan tanpa prinsip yang bertentangan dengan prinsip kedewasaan dan prinsip peradaban.

#### **2.1.1.2. Seks dan Pelacuran**

Seks merupakan energi psikis yang ikut mendorong manusia untuk aktif bertingkah laku. Tidak hanya berbuat di bidang seks saja, yaitu melakukan relasi seksual atau bersanggama, akan tetapi juga melakukan kegiatan-kegiatan nonseksual. Misalnya ikut mendorong untuk berprestasi di bidang ilmu pengetahuan seni, agama, sosial, budaya, tugas-tugas moral, dan lain sebagainya.

Sebagai energi psikis, seks menjadi motivasi atau tenaga dorong untuk berbuat atau bertingkah laku. Freud (dalam Kartini Kartono, 2011:221) menyebutkan seks sebagai libido sexualis (libido=gasang, dukana, dorongan hidup nafsu erotik). Seks merupakan mekanisme bagi manusia untuk mengadakan keturunan. Oleh karena itu seks dianggap sebagai mekanisme yang sangat vital manusia bisa mengabadikan jenisnya.

Di samping relasi sosial biasa, diantara wanita dan pria itu bisa langsung berhubungan kusus yang sifatnya erotis, yang disebut relasi seksual. Dengan relasi seksual ini kedua belah pihak yang berada dalam situasi khusus dapat menghayati bentuk kenikmatan dan puncak kepuasan seksual atau orgasme jika hal itu dilakukan dalam hubungan yang intim dan normal sifatnya. Hubungan seksual antara dua jenis kelamin yang berlainan sifat dan jenisnya, yaitu antara pria dan wanita, disebut sebagai relasi heteroseksual jika dilakukandi antara dua orang dari jenis kelamin yang sama, disebut sebagai homo seksual.

Baik pria maupun wanita harus menyadari bahwa batas relasi seksual itu sebaiknya dilakukan dalam batas-batas norma etis/ susila—sesuai dengan norma-norma masyarakat dan agama demi menjamin kebahagiaan pribadi dan ketentraman masyarakat. Kontrol dan regulasi perlu dilakukan terhadap dorongan-dorongan seks dan impuls seks, agar tidak terlampau ekksesif dan meledak, sehingga dapat melemahkan jasmani dan rohani. Bentuk relasi seks abnormal dan *pervese* (buruk, jahat) adalah: 1) tidak bertanggung jawab, 2) didorong oleh komplusi-komplusi (tekanan paksaan), dan 3) didorong oleh impuls-impuls abnormal.

## **1. Seks Bebas, Cinta Bebas, dan Pelacuran**

Hampir semua masyarakat beradab berpendapat bahwa regulasi atau pengaturan terhadap penyelenggaraan hubungan seks, diatur oleh peraturan-peraturan tertentu. Seks dapat membangun kepribadian, akan tetapi juga bisa menghancurkan sifat-sifat kemanusiaan. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta komunikasi, terjadilah banyak perubahan sosial yang serba cepat pada hampir semua kebudayaan manusia. Perubahan sosial tersebut memengaruhi kebiasaan hidup manusia, sekaligus juga memengaruhi pola-pola seks yang konvensional. Pelaksanaan seks itu banyak dipengaruhi oleh penyebab dari perubahan sosial, antara lain oleh: urbanisasi, mekanisasi, alat kontrasepsi, lamanya pendidikan, demokratisasi fungsi wanita dalam masyarakat, dan modernisasi.

Pada hakikatnya, dalam ekksesivitas (sangat banyak) seks bebas itu sama dengan promiskuitas atau campur aduk seksual tanpa aturan, alias pelacuran. Ekksesivitas tidak mampu menghayati kepuasan seks sejati sebab orang menjadi budak dari dorongan seksual, menjadi pecandu seks tanpa bisa menghayati arti dan keindahan kehidupan erotik sejati.

### **2.1.1.3. Penyebab Timbulnya Pelacuran**

Berlangsungnya perubahan-perubahan sosial yang serba cepat dan perkembangan yang tidak sama dalam kebudayaan, mengakibatkan ketidakmampuan banyak individu untuk menyesuaikan diri, mengakibatkan timbulnya disharmoni, konflik eksternal dan internal, juga disorganisasi dalam

masyarakat dan dalam diri pribadi. Beberapa peristiwa sosial penyebab timbulnya pelacuran antara lain sebagai berikut:

1. Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran, juga tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan atau di luar pernikahan.
2. Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawinan.
3. Komersialisasi seks, baik dipihak wanita maupun geromo dan oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks.
4. Dekadensi moral, merosotnya norma-norma susila dan keagamaan pada saat-saat orang mengenyam kesejahteraan hidup, dan ada pemutarbalikan nilai-nilai pernikahan sejati.
5. Semakin besarnya penghinaan orang terhadap martabat kaum wanita dan harkat manusia.
6. Kebudayaan eksploitasi pada zaman modern ini, khususnya mengeksploitasi kaum lemah, wanita untuk tujuan-tujuan komersil.
7. Ekonomi *laissez-faire* menyebabkan timbulnya sistem harga berdasarkan hukum “jual dan permintaan”, yang diterapkan pula dalam relasi seks.
8. Perkembangan kota-kota, daerah-daerah pelabuhan, dan industri yang sangat cepat dan menyerap banyak tenaga buruh serta pegawai pria.
9. Bertemunya macam-macam kebudayaan asing dan kebudayaan setempat di daerah-daerah perkotaan dan ibu kota mengakibatkan perubahan-

perubahann sosial yang cepat dan radikal, sehingga masyarakatnya menjadi sangat instabil.

Pelacur-pelacur kelas menengah dan kelas atas banyak yang kawin, mereka kurang promiskuous karena selalu memilih langganan-langganan yang berduit banyak. Tidak sedikit sumbangan keuangan yang diberikan para pelacur kepada macam-macam pihak. Khususnya para mucikari atau madam-madam/mami mendapat kira-kira  $1/3 - 1/2$  dari penghasilan bersih para pelacur.

## **2.2. Dampak Sosial Masyarakat Terhadap Keberadaan Lokalisasi**

### **2.2.1. Pandangan Masyarakat Terhadap Eks Lokalisasi**

Dalam kehidupan nyata terdapat sebuah unit-unit pengaruh hidup manusia misalnya; perkumpulan, komunikasi, kelompok dan masih banyak lainnya baik itu bersifat formal atau tidak formal. Dalam setiap komunitas terdapat sebutan masyarakat didalamnya, masyarakat ini merupakan anggota-anggota sebuah kelompok baik itu besar maupun kecil, yang hidup bersama dan sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama (Fafida dalam Soekanto Soejono, 1990:149). Keberadaan lokalisasi Betiring mengakibatkan terjadinya reaksi masyarakat yang positif dan negatif, ada yang menganggap keberadaan lokalisasi menambah pendapatan per ekonomian masyarakat sekitar ada pula yang resah dengan keberadaan lokalisasi yang dianggap sampah masyarakat.

Profesi sebagai pekerja seks atau pelacur tidak dipandang sebagai profesi yang terhormat oleh masyarakat. Memang dikalangan masyarakat sendiri terdapat dualisme dalam menyikapi masalah prostitusi. Hampir dari setiap lapisan

masyarakat yang diketahui sampai dengan bagaimana mereka masuk sampai pada mereka keluar dari perilaku menyimpang dalam pengertian mereka tentang diri sendiri.

Perubahan sosial membantu menciptakan suatu identitas bagi diri mereka sendiri, yang kebanyakan lebih menandakan pada perbedaan status sosial dan ekonomi. Penyebab pelacuran sebenarnya bukan tunggal tetapi cenderung kompleks seperti hubungan dalam keluarga yang tidak baik, pendidikan rendah, kemiskinan, masa depan tidak jelas, tekanan penguasa, hubungan seksual yang terlalu dini, pergaulan bebas, kurang penanaman pendidikan nilai-nilai agama serta perasaan dendam, dan benci kepada laki-laki.

Pelacuran disebabkan adanya penolakan dan tidak dihargai oleh lingkungan, kemiskinan yang begitu mencekik, serta sebuah penawaran dan kemudahan dalam mendapatkan uang ketika melacurkan diri (Fafida dalam Adams Huth, 1999: 209).

### **2.3. Bimbingan Sosial Dalam Pendidikan Nonformal**

#### **2.3.1. Pengertian**

Suatu definisi bimbingan sosial masyarakat yang lengkap dan yang mencakup keseluruhan inti uraian yang diberikan oleh Murray G. Ross (dalam Sutarso, 2005:173) yaitu bimbingan sosial masyarakat merupakan suatu proses dalam suatu masyarakat yang berusaha untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan atau tujuan-tujuannya mengatur kebutuhan-kebutuhan ini mengembangkan kepercayaan dan hasrat untuk menggarap kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan ini, menemukan sumber-sumber (dan dalam, dan atau dari luar masyarakat) untuk

menggarap kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan ini, mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal ini, dan dalam pelaksanaan keseluruhan ini memperluas dan mengembangkan sikap-sikap dan praktik-praktik kooperatif dan kolaboratif di dalam masyarakat.

Definisi ini mengandung unsur-unsur yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan istilah “proses”

Proses adalah serentetan tindakan, yang disadari maupun yang tidak sengaja dan mulai penentuan sesuatu masalah atau tujuan sampai pada pemecahan masalah atau tercapainya tujuan didalam masyarakat. Berbagai proses dapat ditemukan dalam penanggulangan masalah-masalah kemasyarakatan, tetapi dalam hubungan dengan pengertian tersebut diatas proses ini merupakan proses bimbingan sosial masyarakat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar berfungsi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Kemampuan ini tumbuh dan berkembang secara bertahap sebagai akibat upaya dilakukan oleh masyarakat untuk menanggulangi satu atau lebih masalah- masalahnya. Proses ini terkadang disengaja atau direncanakan, kadang kadang merupakan tindakan yang dipilih untuk dilakukan secara bersama oleh warga masyarakat (karena tradisi, karena enak, atau karena memang terjadi begitusaja atau mengalir). Oleh karena itu proses ini dapat berlangsung tanpa ikut serta atau tanpa bantuan tenaga profesional. Tugas

tenaga profesional dalam bimbingan sosial masyarakat adalah membantu memulai, memperlancar, dan mengembangkan proses tersebut.

Untuk melaksanakan tugas ini digunakan metode-metode tertentu. Dalam hubungan ini perlu ditekankan bahwa adanya kecenderungan untuk mencampurkan proses dengan metode, maka tugas tenaga profesional disini ialah menggunakan metode-metode tertentu untuk memperlancar proses. Proses ini sendiri berlangsung tanpa adanya tenaga profesional ataupun tanpa disadari oleh berbagai pihak yang terlibat didalamnya. Tugas tenaga profesional adalah menjadikan proses ini disadari, dipahami, dan diatur secara berencana.

Istilah “masyarakat” yang digunakan dalam definisi diatas menunjukkan dua macam pengelompokan dua orang yaitu:

1. Keseluruhan orang yang tinggal di suatu daerah geografis, misalnya desa, kota, propinsi, negara atau dunia masalah saja dapat dikatakan tugas Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dilaksanakan adalah upaya untuk mengembangkan hubungan kerja sama antar negara untuk menghadapi masalah-masalah dan tujuan-tujuan bersama, yang terpenting diantaranya ialah menghilangkan peperangan dan menciptakan perdamaian walaupun bimbingan sosial pada umumnya dilaksanakan di daerah geografis yang sempit, tetapi dapat juga diterapkan untuk daerah-daerah yang lebih luas.
2. Kelompok-kelompok orang mempunyai minat-minat atau fungsi yang sama misalnya bimbingan kesejahteraan, pertanian, pendidikan, dan keagamaan. Minat ini tidak mencakup setiap orang dalam lingkungan

masyarakat geografis tetapi hanya perorangan dan kelompok-kelompok yang mempunyai kesamaan minat atau fungsi saja. Tidak sedikit masyarakat-masyarakat fungsional yang mengalami kesulitan untuk menentukan identitas mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu mereka mengacaukan diri mereka dengan masyarakat geografis. Tidak jarang terjadi perkumpulan di bidang kesejahteraan sosial, atau rekreasi, pendidikan orang dewasa yang menganggap sama perkumpulan mereka dengan masyarakat geografis sehingga mereka sulit menentukan fungsi-fungsi mereka secara tetap. Perkumpulan kesejahteraan dan badan-badan sejenis lainnya mempunyai tujuan yang beraneka ragam antara lain ialah: a) menciptakan suatu kelompok, yang beranggotakan orang-orang yang menaruh minat dalam kesejahteraan sosial; b) menyusun rencana untuk memenuhi kebutuhan anggota kelompok ini serta kebutuhan kesejahteraan dari masyarakat geografis; c) mengusahakan dukungan dari masyarakat geografis terhadap rencana-rencana yang sudah mereka susun, dan prinsip-prinsip bimbingan sosial masyarakat yang digunakan masyarakat fungsional maupun masyarakat geografis adalah sama.

#### 1. Proses menentukan kebutuhan dan tujuan

Proses menentukan kebutuhan dan tujuan berarti cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk menemukan dan memusatkan perhatian pada masalah yang mengganggu mereka, serta menentukan tujuan yang akan dicapai. Masyarakat dapat ikut serta dalam penentuan tujuan masyarakat, kelompok pemuka masyarakat, masyarakatlah yang biasanya terlibat penentuan kebutuhan, masalah

dan tujuan. Pemimpin yang mewakili dan berkonsentrasi dengan kelompoknya masing-masing berusaha untuk menentukan masalah atau masalah-masalah yang harus ditanggulangi. Proses ini ditujukan untuk menyadarkan tentang “hal-hal yang tidak disukai masyarakat”, “hal-hal yang dibutuhkan dimasyarakat ini”, “hal-hal yang sebenarnya dapat dilakukan oleh masyarakat ini.” Walaupun proses ini nampaknya sederhana, bimbingan sosial masyarakat sangat penting karena perasaan yang muncul dari pengutaraan hal-hal tersebut dapat melandasi untuk melaksanakan kegiatan.

Banyak pembimbing kemasyarakatan yang beranggapan bahwa kesadaran ini ada di dalam diri warga masyarakat. Karena tidak berusaha menumbuhkannya, sikap ini tidaklah benar banyak orang yang hidup dengan permasalahan untuk jangka waktu yang lama, sehingga mereka menyesuaikan diri terhadap permasalahan ini, membangun mekanisme pertahanan yang mampu membendung munculnya permasalahan ke alam kesadaran mereka. Mereka juga telah belajar untuk menerima permasalahan sedemikian rupa sehingga perasaan mereka menjadi terkubur dan tidak menyadari permasalahan ini, didalam bimbingan sosial masyarakat, masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan, minat dan harapan harus diusahakan penedarannya kepada warga masyarakat, perasaan yang menyertai harus diungkapkan emosi dilepaskan, dan dikendalikan.

### **2.3.2. Perencanaan dan Pengintegrasian Masyarakat**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proses bimbingan sosial masyarakat mengandung dua unsur pokok, yaitu perencanaan dan pengintergrasian masyarakat. Kedua unsur ini penting tetapi kedua unsur ini tidak

dapat dipisahkan. Justru pertautan diantara keduanya membentuk proses bimbingan sosial masyarakat.

Perencanaan yang digunakan mencakup keseluruhan unsur dari suatu tindakan, yaitu dari penentuan masalah sampai pada tindakan yang diambil terhadap masalah ini. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan, menemukan, dan memeperjelas arti suatu masalah, mengungkapkan hakekat dan ruang lingkup masalah, mempertimbangkan berbagai upaya yang diperlukan guna penanggulangan, memilih upaya penanggulanagn yang yang kita dapat laksanakan dan mengadakan kegiatan yang sesuai dengan upaya yang telah dipilih. Perencanaan ini merupakan suatu proses yang kompleks dan mencakup keeluruhan proses bimbingan sosial masyarakat. Berbagai pihak yang melibatkan diri dalam proses bimbingan sosial masyarakat menganggap bahwa suatu proses perencanaan telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien, maka proses bimbingan sosial masyarakat dilaksanakan dengan berhasil.

Pelaksanaan proses perencanaan seperti ini sangat penting, tetapi belum merupakan langkah-langkah yang memadai. Unsur kedua yang masih perlu ditambah adalah “pengintegrasian masyarakat”. Pengintegrasian masyarakat ini merupakan suatu proses penerapan sikap dan praktik-praktik kerjasama menghasilkan peningkatan dalam 1) identifikasi dengan masyarakat secara keseluruhan, 2) minat dan partisipasi dalam urusan kemasyarakatan, dan 3) saling menukar nilai-nilai dan sarana-sarana untuk mengutarakan nilai-nilai ini. Oleh karena itu pengintegrasian masyarakat merupakan proses yang berlangsung didalam masyarakat yang dapat memperlancar 1) pertumbuhan dan kesadaran dan

loyalitas kepada masyarakat dimana perorangan menjadi salah satu bagiannya, 2) peningkatan perasaan tanggung jawab terhadap kondisi dan kedudukan masyarakat, 3) pemunculan sikap yang memungkinkan kerjasama dengan orang-orang yang mempunyai perbedaan dalam berbagai seginya, 4) pertumbuhan nilai-nilai yang sama didalam masyarakat secara keseluruhan.

Pengintegrasian masyarakat ini tidak berarti bahwa suatu masyarakat harus memiliki norma-norma, kepercayaan, nilai, dan cara. Kehidupan yang sama dan terstandarisasi yang diartikan disini ialah bahwa masyarakat merupakan suatu “kehidupan bersama” dan karmempunyai nilai-nilai yang digunakan oleh perorangan untuk mengidentifikasi diri serta untuk saling memberikan sumbangan dalam kehidupan bersama. Tercakup dalam pengertian ini ialah asumsi bahwa keterikatan dengan merasakan menjadi bagian dari kehidupan bersama dapat memberi pengalamanpada perorangan untuk memperoleh ketentraman psikologis tertentu, dan memberikan arti pada kehidupannya. Disamping itu, hal seperti ini dapat membentuk suatu masyarakat yang mampu mengulangi masalah-masalah bersama.

Proses pengintegrasian masyarakat tidak berarti dihilangkannya perbedaan-perbedaan antarkelompok atau golongan di dalam masyarakat. Perencanaan dan pengintegrasian masyarakat merupakan unsur terpadu dari satu proses. Pengintegrasian masyarakat merupakan suatu tujuan yang sangat penting, tujuan ini tidak akan tercapai begitu saja, atau melalui pertemuan-pertemuan atau menginginkan atau membicarakan saja.

### **2.3.3. Bimbingan Masyarakat Sosial Sebagai Proses Pekerjaan Sosial**

Bimbingan sosial masyarakat seperti telah didefinisikan merupakan salah satu dari proses dasar pekerjaan sosial yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan dasar yang sama, dan menggunakan banyak metode-metode yang bersama seperti yang terdapat pada proses bimbingan sosial perseorangan dari bimbingan sosial kelompok. Tujuan pekerja social dalam membimbing mantan WTS dengan cara memberikan keterampilan, pelatihan wirausaha dan bimbingan keagamaa, bimbingan keterampilan kepada eks WTS dapat dilakukan melalui tiga program keterampilan yaitu menjahit, tata rias, dan olahan pangan. Manfaat pemberian keterampilan tersebut adalah memberi bekal eks WTS dengan keterampilan yang disesuaikan dengan minat dan kemampuannya agar mereka bisa mandiri dengan keterampilan yang dimiliki. Dengan adanya pelatihan mantan WTS dapat mengubah orientasi hidup dan mata pencaharian menjadi wiraswasta atau pedagang. Selain bimbingan keterampilan, bimbingan keagamaan juga diberikan kepada eks WTS bimbingan keagamaan melalui pendekatan psikologis eks WTS. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memulihkan kembali psikologis eks WTS dalam kehidupan selanjutnya. Tidak hanya dengan pendekatan secara psikologis dengan adanya kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin, salat berjamaah, membaca Al-Quran, diharapkan para eks WTS tergugah hatinya untuk berubah menjadi wanita baik-baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam bimbingan sosial perorangan diakui bahwa seorang klien harus dilibatkan dalam penentuan masalahnya serta upaya untuk menanggulangnya. Jika proses ini berhasil maka klien akan memiliki kemampuan yang lebih besar yang tidak saja untuk mengulangi masalahnya ini tetapi juga situasi-situasi

lainnya di dalam kehidupan. Hal yang sama juga berlaku pada bimbingan sosial masyarakat, disini juga diakui bahwa masyarakat sendiri harus berjuang dan berupaya untuk menghadapi konsepsinya sendiri tentang kebutuhan-kebutuhannya dan masalah-masalahnya sehingga dalam proses ini masyarakat dapat meningkatkan kemampuan yang tidak saja untuk memenuhi kebutuhan mengatasi masalah yang dialami pada saat ini, tetapi juga kebutuhan dan masalah lainnya yang muncul dikemudian hari.

Oleh karena itu walaupun konteks pelaksanaan bimbingan sosial perorangan, kelompok dan bimbingan sosial masyarakat berlainan, tetapi secara fundamental tujuan-tujuan serta sarana-sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan diantara ketiganya adalah sama. Pengertian bimbingan sosial rumusannya adalah bimbingan sosial perorangan yang berusaha untuk membantu perorangan untuk menentukan masalah-masalahnya ini mengambil tindakan dalam kaitan dengan masalah-masalah ini dan dengan keseluruhan. Upaya ini mengingatkan pengertian terhadap diri sendiri dan kemampuan untuk mengintegrasikan dirinya.

Analogi tidak perlu ditarik lebih lanjut karena seorang pembimbing sosial perorangan menghadapi perorangan, melaksanakan tugas atas dasar teori psikodinamika dan berusaha untuk mengaitkan berbagai unsur dari tingkah laku perorangan. Pembimbing sosial masyarakat menghadapi seluruh masyarakat dan unsur teori-teori sosial budaya, menghadapi berbagai kebutuhan warga masyarakat yang dapat diungkapkan melalui pertemuan-pertemuan, serta berusaha mengaitkan keanekaragaman kelompok satu sama lain.

Pembimbing sosial masyarakat bertugas mengadakan pengalihan seseorang dan kelompok atau organisasinya. Ia harus mengatasi permusuhan ini melalui orang-orang yang memimpin atau mengatur organisasi. Ia mungkin akan membantu kelompok atau masyarakat untuk mengatasi ungkapan permusuhan tadi tetapi pada waktu yang bersamaan ia juga berusaha untuk tetap konsisten menghadapi upaya pencapaian tujuan kemasyarakatan yang sebelumnya.

Upaya petugas disini ditunjukkan untuk membantu masyarakat mengembangkan daya tarik yang diperlukan untuk menghadapi, menerima, dan mengatasi berbagai ungkapan perasaan melalui pertemuan-pertemuan ia membantu masyarakat agar menyadari bahwa dalam proses untuk mencapai kerjasama seringkali ditemukan konflik dan permusuhan yang sulit dicegah terjadinya, tetapi inti proses yang melibatkan masyarakat ini adalah pengembangan, kemampuan untuk mengatasi masalah melalui pertemuan.

#### **2.3.4. Eks Wanita Tuna Susila dalam perspektif Teoritis**

Persoalan mengenai konsep diri tidak hanya berkenaan dengan masalah psikologis, namun juga berhubungan dengan komunikasi. Oleh karena itu, pembahasan tentang fenomena eks WTS harus disertakan juga kajian tentang konsep dirinya. Terdapat beberapa definisi konsep diri yang dikemukakan oleh berbagai pakar. Anita Taylor (dalam Rahmat, 2012: 99) misalnya, memaknai konsep diri sebagai "*all you think and feel about you, you entire complex of beliefs and attitude you hold about your self.*" Sedangkan Hurlock (1978) mengatakan bahwa konsep diri adalah kesan (*image*) individu mengenai

karakteristik dirinya yang mencakup karakteristik fisik, sosial, emosional, aspirasi dan *achievement*.

Seluruh pemaknaan atau devinisi tentang konsep diri yang dikemukakan oleh beberapa pakar seperti di atas, pada dasarnya memiliki esensi makna yang sama, hanya diungkapkan dengan bahasa dan perspektif yang sedikit berbeda. Seluruh devinisi konsep diri yang dikemukakan tersebut mengacu kepada pengertian bagaimana individu memandang dirinya. Oleh karena itu, konsep diri dapat dimaknai sebagai pandangan subjektif individu mengenai pribadinya secara utuh.

Konsep diri seseorang oleh beberapa kalangan tidak diklaim sebagai suatu yang *given*, atau yang telah ada dan bersifat pasif (statis), namun konsep diri merupakan suatu hasil interaksi seseorang dengan lingkungannya. George Herbert Mead (dalam Sobur, 2003:512) mengatakan bahwa konsep diri merupakan produk social yang dibentuk melalui proses internalisasi dan organisasi pengalaman-pengalaman psikologis.

#### **2.4. Hubungan Wanita Tuna Susila, Pelatihan Kecakapn hidup, Bimbingan Sosial, dan Pendidikan Nonformal**

Wanita tuna susila adalah salah satu perilaku yang menyimpang di masyarakat yaitu perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok. Wanita Tuna Susila (WTS) merupakan masalah sosial yang sulit untuk dipecahkan. Adanya WTS di tengah masyarakat dianggap sebagai permasalahan sosial dan sangat mengganggu

masyarakat karena perbuatan tersebut dilarang oleh agama dan norma-norma masyarakat.

Tuna susila atau tindak asusila itu diartikan sebagai kurang beradab karena keroyolan relasi seksualnya dalam bentuk penyerahan diri pada banyak laki-laki untuk pemuasan seksual dan mendapat imbalan jasa atau uang bagi pelayanannya. Tunasusila itu juga bisa diartikan sebagai salah tingkah, tidak susila atau gagal menyesuaikan diri terhadap norma-norma susila. Maka pelacuran adalah wanita yang tidak pantas kelakuannya dan bisa mendatangkan masalah/ celaka dan penyakit, baik kepada orang lain yang bergaul dengan dirinya, maupun kepada diri sendiri.

Pelacuran merupakan profesi yang sangat tua usianya yaitu berupa tingkah laku lepas bebas tanpa kendali dan cabul, karena adanya pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas – batas kesopanan. Pelacuran itu selalu ada pada semua negara berbudaya, sejak zaman purba sampai sekarang yang senantiasa menjadi masalah sosial atau menjadi objek urusan hukum dan tradisi.

Faktor-faktor yang menyebabkan Pekerja Seks Komersial (PSK) dianggap sebagai pekerja yang tidak bermoral yaitu pekerjaan ini identik dengan perzinaan yang merupakan suatu kegiatan seks yang dianggap tidak bermoral oleh agama. WTS dianggap sebagai ancaman terhadap kehidupan keluarga yang dibentuk melalui perkawinan dan melecehkan nilai sakral perkawinan. Kaum wanita membenci WTS karena dianggap sebagai pencuri cinta dari laki-laki (suami) sekaligus pencuri hartanya. Motif yang melatar belakangi seorang wanita menjadi

WTS yaitu kesulitan hidup, nafsu seks abnormal, tekanan ekonomi, aspirasi materil tinggi, kompensasi terhadap perasaan inferior, ingin tahu pada masalah seks, pemberontakan terhadap otoritas orangtua dan lain sebagainya.

Dengan adanya Wanita Tuna Susila, faktor dan motif Pekerja Seks Komersial di lingkungan masyarakat adapun penanggulangan dari masalah tersebut yaitu dengan diberikan Pendidikan Non Formal. Menurut Sudjana (2004:146) Satuan pendidikan luar sekolah adalah Lembaga kursus, Lembaga pelatihan, Kelompok belajar, Pusat kegiatan belajar masyarakat, Majelis taklim dan satuan pendidikan yang sejenis.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan luar sekolah adalah suatu kegiatan yang terorganisasi yang diselenggarakan diluar persekolahan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dalam hal ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

#### **2.4.1. Teori Pelatihan Life Skill**

Sebagaimana dijelaskan dalam Kurikulum 2004, kecakapan hidup adalah "Kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mampu memecahkan permasalahan hidup secara wajar dan menjalani kehidupan secara bermartabat tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif mencari serta menemukan solusi, sehingga akhirnya mampu mengatasinya".

Berdasarkan pengertian di atas, kecakapan hidup (life skills) merupakan kecakapan untuk memecahkan masalah secara inovatif dengan menggunakan fakta, konsep, prinsip atau prosedur yang telah dipelajari. Secara umum pelatihan bertujuan untuk: (a) menambah keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan

dengan lebih cepat dan efektif, (b) mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional, dan (c) pengembangan sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerja sama (Moekijat, 1993: 2-3). Dari berbagai pengalaman mempelajari berbagai mata pelajaran, diharapkan siswa memperoleh hasil sampingan yang positif berupa upaya memanfaatkan pengetahuan, konsep, prinsip dan prosedur untuk memecahkan masalah baru dalam bentuk kecakapan hidup. Di samping itu, kecakapan hidup tersebut hendaknya diupayakan pencapaiannya dengan mengintegrasikannya pada topik dan pengalaman belajar yang relevan (Depdiknas, 2003).

Dengan demikian, life skills memiliki makna yang lebih luas dari kecakapan kerja tertentu (vocational skills). Life skills lebih tepat diartikan sebagai kecakapan hidup. Pengertian kecakapan hidup di sini, tidak semata-mata berarti memiliki kemampuan tertentu saja, namun ia harus memiliki kompetensi dasar pendukungnya, seperti membaca, menulis, menghitung, merumuskan dan memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam tim atau kelompok, terus belajar di tempat bekerja, mempergunakan teknologi, dan lain sebagainya.

Life skills (kecakapan hidup) menunjuk pada berbagai ragam kemampuan seseorang untuk menempuh kehidupan dengan sukses, bahagia dan secara bermartabat di dalam masyarakat. Beberapa manfaat seperti yang diungkapkan oleh Robinson(1981:19) dalam Marzuki (1992:28) sebagai berikut: (a) pelatihan sebagai alat untuk memperbaiki penampilan/ kemampuan individu atau kelompok dengan harapan memperbaiki performance organisasi. Perbaikan – perbaikan itu dapat dilaksanakan dengan berbagai cara; (b) keterampilan tertentu diajarkan agar

para karyawan dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai standat yang diinginkan.

(c) pelatihan juga dapat memperbaiki sikap- sikap terhadap pekerjaan, terhadap pimpinan atau karyawan.

#### **2.4.2. Pengertian Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills Education)**

Istilah Kecakapan Hidup (*life skills*) diartikan sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan penghidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya (Dirjen PLSP, Direktorat Tenaga Teknis, 2003).

Brolin (1989) menjelaskan bahwa *life skills constitute a continuum of knowledge and aptitude that are necessary for a person to function effectively and to avoid interruptions of employment experience*. Brolin memaparkan bahwa yang dimaksud *life skills* adalah sesuatu yang kontinum dari pengetahuan dan sikap yang penting untuk seseorang agar mendapatkan fungsi yang efektif dan berpengaruh terhadap pengalaman hidup pegawai. Dengan demikian, *life skill* dapat dinyatakan sebagai kecakapan untuk hidup (*experience*). Istilah hidup, tidak semata-mata memiliki kemampuan tertentu saja (*vocational job*), namun ia harus memiliki kemampuan dasar pendukungnya secara fungsional seperti membaca, menulis, menghitung, merumuskan, dan memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam tim, terus belajar di tempat kerja, mempergunakan teknologi (Ditjen PLS, Direktorat Tenaga Teknis, 2003).

Indikator-indikator yang terkandung dalam *life skills* tersebut secara konseptual dikelompokkan : (1) Kecakapan mengenal diri (*self awarness*) atau sering juga disebut kemampuan personal (*personal skills*) (2) Kecakapan berfikir rasional (*thinking skills*) atau kecakapan akademik (*akademik skills*) (3) Kecakapan sosial (*social skills*) (4) Kecakapan vokasional (*vocational skills*) sering juga disebut dengan keterampilan kejuruan artinya keterampilan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu dan bersifat spesifik (*spesifik skills*) atau keterampilan teknis (*technical skills*) (Ditjen PLS, Direktorat Tenaga Teknis, 2003). Menurut Jecques Delor mengatakan bahwa pada dasarnya program *life skills* ini berpegang pada empat pilar pembelajaran yaitu sebagai berikut: *Learning to know* (belajar untuk memperoleh pengetahuan), *Learning to do* (belajar untuk dapat berbuat /bekerja), *Learning to be* (belajar untuk menjadi orang yang berguna), *Learning to live together* (belajar untuk dapat hidup bersama dengan orang lain) Tujuan pendidikan kecakapan hidup dalam pedoman pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) yang dikeluarkan oleh Direktorat Tenaga Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional (Ditjen PLS, 2003) adalah sebagai berikut: Pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan non formal bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap warga belajar di bidang pekerjaan/usaha tertentu sesuai dengan bakat, minat perkembangan fisik dan jiwanya serta potensi lingkungannya, sehingga mereka memiliki bekal kemampuan untuk bekerja atau berusaha mandiri yang dapat dijadikan bekal untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Berdasarkan pengertian life skills sebagaimana diuraikan di atas, pendidikan kecakapan hidup dapat difahami sebagai usaha untuk membantu dan membimbing aktualisasi potensi peserta didik untuk mencapai sejumlah kompetensi, baik berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang mengarah pada permasalahan hidup, menjalani kehidupan secara mandiri dan bermartabat, serta proaktif dalam mengatasi masalah. Pendidikan kecakapan hidup menurut Tim BBE Depdiknas (2002) pendidikan kecakapan hidup (Life Skills Education) merupakan proses pendidikan yang mengarah pada pembekalan kecakapan seseorang, untuk mampu dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar, tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari solusinya, sehingga akhirnya mampu mengatasi problema tersebut. Penjelasan pasal 26 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan kecakapan hidup (life skills education) adalah "Pendidikan yang memberikan kecakapan personal, sosial, intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri".

#### **2.4.3. Tujuan pendidikan luar sekolah**

Tujuan pendidikan luar sekolah sebagaimana digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 adalah.

- a) melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat serta mutu kehidupannya;

- b) membina warga agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;
- c) memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.

Hamijoyo (dalam Kamil, 2010:33) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan luar sekolah adalah untuk memecahkan masalah ketelantaran pendidikan, baik bagi mereka yang belum pernah sekolah maupun gagal sekolah (*drop out*), serta memberikan bekal sikap, keterampilan dan pengetahuan praktis yang relevan dengan kebutuhan kehidupannya.

#### **2.4.4. Fungsi pendidikan luar sekolah**

Kamil (2010:33) berpendapat bahwa untuk mencapai tujuannya, pendidikan luar sekolah memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a) mengembangkan nilai-nilai rohaniah dan jasmaniah warga belajar atas dasar potensi yang dimiliki;
- b) mengembangkan cipta, rasa, dan karsa warga belajar agar lebih kreatif, maupun memahami lingkungannya, dan mempunyai kemampuan untuk mengaktualisasikan diri;
- c) membantu warga belajar membentuk dan menafsirkan pengalaman mereka serta mengembangkan kerja sama dan partisipasi aktif dalam memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan masyarakatnya;

- d) mengembangkan cara berpikir dan bertindak kritis terhadap dan di dalam lingkungannya serta untuk memiliki kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e) mengembangkan sikap dan moral tanggung jawab sosial, pelestarian nilai-nilai budaya, serta keterlibatan diri dalam perubahan masyarakat.

#### **2.4.5. Ciri-ciri pendidikan luar sekolah**

Ciri- ciri pendidikan luar sekolah dapat dilihat dari karakteristik, waktu penyelenggaraan, program, proses belajar dan pembelajaran dan pengendalian program

- a. Dari segi waktu, pendidikan luar sekolah memiliki ciri-ciri:
  - 1). Relatif singkat dan bergantung pada kebutuhan belajar peserta didik.
  - 2). Menggunakan waktu dan tidak secara terus menerus. Waktu biasanya ditetapkan dengan kesempatan peserta didik, serta memungkinkan untuk melakukan kegiatan belajar sambil bekerja dan berusaha.
- b. Dari segi program, pendidikan luar sekolah memiliki karakteristik, yaitu
  - 1). kurikulum berpusat pada kepentingan peserta didik. Kurikulum bermacam ragam atas dasar perbedaan kebutuhan belajar peserta didik;
  - 2). menekankan pada kebutuhan masa sekarang dan masa depan terutama untuk memenuhi kebutuhan teras peserta didik guna meningkatkan kemampuan sosial ekonominya;
  - 3). mengutamakan aplikasi dengan penekanan kurikulum yang lebih mengarah kepada keterampilan yang bernilai guna bagi kehidupan peserta didik dan lingkungannya;

- 4). persyaratan masuk ditetapkan bersama peserta didik. Persyaratan untuk mengikuti program adalah kebutuhan, minat dan kesempatan peserta didik;
  - 5). program diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan untuk mengembangkan potensi peserta didik.
- c. Dari segi proses belajar dan pembelajaran, pendidikan luar sekolah memiliki ciri-ciri:
- 1) dipusatkan dilingkungan masyarakat dan lembaga, kegiatan belajar dan pembelajaran diberbagai lingkungan (masyarakat, tempat kerja) atau di satuan pendidikan luar sekolah lainnya;
  - 2) berkaitan dengan kehidupan peserta didik dan masyarakat. pada saat mengikuti program pendidikan, peserta didik berada dalam dunia kehidupan dan pekerjaannya. Lingkungan dihubungkan secara fungsional dengan kegiatan belajar;
  - 3) struktur program pembelajaran lebih fleksibel dan beraneka ragam dalam jenis dan urutannya sehingga pengembangan program dapat dilaksanakan pada waktu program sedang berjalan;
  - 4) berpusat pada peserta didik dengan menggunakan sumber belajar dari berbagai keahlian. Peserta didik juga bisa menjadi sumber belajar dengan lebih menekankan pada kegiatan membelajarkan.
  - 5) penghematan sumber-sumber dengan memanfaatkan tenaga dan sarana yang tersedia di masyarakat dan di lingkungan kerja

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan luar sekola dalam penyelenggaraannya lebih fleksibel dan beraneka ragam dalam hal menekankan kebutuhan peserta didik dimasa sekarang dan masa depan guna mengembangkan potensi pada peserta didik yang dapat diaplikasikan kepada masyarakat.

#### **2.4.6. Lingkup pendidikan luar sekolah**

Sudjana (2004:145) Lingkup pendidikan luar sekolah antara lain: a) Pendidikan anak usia dini, b) Pendidikan keaksaraan, c) Pendidikan kesetaraan, d) Pendidikan kecakapan hidup, e) Pendidikan kepemudaan, f) Pemberdayaan perempuan, g) Pelatihan.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan luar sekolah sangat menjangkau mulai dari pendidikan anak usia dini sampai pendidikan orang dewasa dalam hal ini pendidikan luar sekolah adalah pendidikan sepanjang hayat yang semua dimiliki oleh setiap individu. Salah satu lingkup Pendidikan Luar Sekolah yang di berikan kepada Eks WTS adalah pelatihan dan bimbingan sosial.

##### **1. Pengertian pelatihan**

Istilah pelatihan merupakan terjemahan dari kata “*training*” dalam bahasa inggris. Secara harfiah arti kata “*training*” adalah “*train*”, yang berarti: (1) memberi pelajaran dan praktik (*give teaching and practice*), (2) menjadikan berkembang dalam arah yang dikehendaki (*cause to grow in a required direction*), (3) persiapan (*preparation*), dan (4) praktik (*practice*).

Simamora (dalam Kamil,2010:4) mengartikan pelatihan sebagai serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian,

pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seorang individu. Sementara dalam instruksi presiden No.15 tahun 1974, pengertian pelatihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat, dan dengan menggunakan metode yang lebih menggunakan praktik daripada teori.

Penelitian menurut Anwar (2010:16) adalah usaha berencana yang diselenggarakan supaya dicapai penguasaan keterampilan, pengetahuan, dan sikap relevan dengan kebutuhan peserta pelatihan. Umumnya pelatihan dilakukan untuk pendidikan jangka pendek dengan prosedur yang sistematis dan terorganisir untuk tujuan tertentu. Pelatihan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas peserta atau mengembangkan kemandirian. Istilah kemandirian berusaha yang dipersamakan dengan kewirausahaan, selanjutnya dapat dibandingkan dengan *entrepreneur*.

Dalam penjelasan pasal 26 ayat 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, dijelaskan bahwa kursus dan pelatihan adalah bentuk pendidikan berkelanjutan (*continuing education*) untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional.

Lembaga kursus dan pelatihan adalah satuan pendidikan nonformal. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelatihan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam waktu yang relatif singkat yang diselenggarakan dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan sikap sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu pelatihan juga dapat memandirikan peserta didik dalam mengembangkan jiwa kewirausahaannya.

#### 1. Tujuan Pelatihan

Dale S. Beach (dalam Kamil 2010:10), mengemukakan, "*the objective of training is to achieve a change in the behavior of those trained*". (Tujuan pelatihan adalah untuk memperoleh perubahan dalam tingkah laku mereka yang dilatih).

Atas dasar ini Moekijat mengatakan bahwa tujuan umum pelatihan adalah

- a) untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif;
- b) untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional;
- c) untuk mengembangkan sikap, sehingga dapat menimbulkan kemauan untuk bekerja sama.

Salah satu aplikasi nyata kebijakan pendidikan nonformal adalah memberikan kecakapan hidup kepada peserta didik agar dapat beradaptasi dan berkarya nyata di tengah-tengah masyarakat.

Kecakapan hidup sebagai terjemahan dari *lifeskill* dimaknai secara beragam oleh banyak pihak. Menurut Brollin (dalam Alifuddin, 2011:71) kecakapan hidup (*life skill*) merupakan kontinum pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan

oleh seseorang agar berfungsi secara independen dalam kehidupannya. Sedangkan *unitedStates Labor Office* menyatakan bahwa life skill adalah kecakapan sehari-hari yang diperlukan oleh seseorang agar berhasil dalam kehidupannya. Sedangkan menurut Fajar (dalam Alifuddin, 2011:71) mendefinisikan kecakapan hidup sebagai kecakapan untuk bekerja selain kecakapan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

Kecakapan hidup mengacu pada berbagai ragam kemampuan yang diperlukan seseorang untuk menempuh kehidupan dengan sukses, bahagia dan secara bermartabat di masyarakat. kecakapan hidup merupakan kemampuan berkomunikasi secara efektif, kemampuan mengembangkan kerjasama, melaksanakan peranan sebagai warga negara yang bertanggung jawab, memiliki kesiapan serta kecakapan untuk bekerja dan memiliki karakter dan etika untuk terjun ke dunia kerja.

Pada dasarnya kecakapan hidup membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan belajar (*learning how to learn*), menghilangkan kebiasaan dan pola pikir yang tidak tepat (*learning how to unlearn*), menyadari dan mensyukuri potensi diri untuk dikembangkan dan diamalkan, berani menghadapi masalah kehidupan, dan memecahkannya secara kreatif.

Alifuddin (2011:75) berpendapat bahwa kecakapan hidup dapat dikelompokkan dalam lima aspek, yaitu (1) kecakapan mengenal diri atau kemampuan pribadi, (2) kecakapan sosial atau kecakapan antar pribadi, (3)

kecakapan berpikir rasional, (4) kecakapan akademik, dan (5) kecakapan vokasional

Dalam hal ini, penyelenggaraan kursus atau pelatihan merupakan manifestasi pendidikan kecakapan hidup, yaitu pendidikan yang dapat memberikan bekal keterampilan praktis, terpakai terkait dengan kebutuhan pasar, peluang usaha dan potensi ekonomi atau industri yang ada dimasyarakat.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pelatihan adalah sebagai bekal bagi peserta didik untuk dapat mengetahui kecakapan hidup dalam dirinya untuk memperoleh perubahan dalam hidup. Dalam hal ini adalah perubahan dalam bertingkah laku.

#### 1. Pelatihan Dalam Konsep Pendidikan Luar Sekolah

Pada penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, konsep *learning* (pembelajaran), *education* (pendidikan), dan *training* (pelatihan) secara umum menjadi sesuatu yang integratif dalam implementasi kegiatannya, terutama program-program yang sasarannya pemuda dan orang dewasa. Pembelajaran sering digunakan sebagai salah satu aktivitas dalam program pendidikan luar sekolah untuk memberikan pemahaman materi-materi yang sifatnya kognitif dan afektif. Sementara itu pelatihan diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi sasaran yang berhubungan dengan kecakapan pelaksanaan tugas dilapangan. Penilaian terhadap hasil pembelajaran dilakukan untuk mengetahui mengenai perubahan perilaku (pengetahuan, keterampilan, nilai, aspirasi) yang dialami peserta didik atau lulusan setelah penerapan hasil belajarnya seperti dalam perolehan atau

peningkatan pendapatan, pembelajaran orang lain, dan keikutsertaan dalam pembangunan masyarakat.

#### 1. Tujuan Pelatihan Bagi Eks Wts

Moekijat (dalam Kamil, 2010: 11) mengatakan bahwa tujuan umum pelatihan adalah untuk a) mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif, b) mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional, c) mengembangkan sikap, sehingga dapat menimbulkan kemauan untuk bekerja sama.

Sedangkan menurut Marzuki (dalam Kamil, 2010: 11), ada lima tujuan pokok yang harus dicapai dengan pelatihan, yaitu, a) memenuhi kebutuhan organisasi, b) memperoleh pengertian dan pemahaman yang lengkap tentang pekerjaan tentang standard an kecepatan yang telah ditetapkan dan dalam keadaan yang normal serta aman. c) untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik, d) untuk mengembangkan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional, e) untuk mengembangkan kemampuan seseorang dalam bekerja sama dengan orang lain sehingga dalam suatu organisasi dapat membagi pekerjaannya sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing agar pekerjaan dapat selesai lebih cepat dan tepat waktu.

Dari uraian di atas tujuan dari pelatihan untuk para eks WTS adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan WTS dalam bekerja sesuai

dengan bakat dan kemampuan yang telah diperoleh saat mengikuti pelatihan. Pemberian keterampilan terhadap eks WTS bertujuan untuk stimulan menjalani hidup mandiri.

### 1. Fungsi Pelatihan

Fungsi dari pelatihan adalah untuk mempersiapkan seseorang pada jabatan yang lebih tinggi maupun untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperbaiki perilaku seseorang dalam bekerja maupun dengan cara meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Prinsip pelatihan merupakan bagian dari proses pembelajaran, maka prinsip-prinsip pelatihan dikembangkan dari prinsip pembelajaran agar pelatihan berhasil.

### 2. Bimbingan Sosial

Dengan adanya Pendidikan Nonformal melalui Pelatihan terhadap Eks WTS diharapkan pelatihan tersebut dapat meningkatkan kemampuan WTS dalam bekerja sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Selain itu pelatihan Eks WTS juga mendapatkan bimbingan sosial yang diberikan oleh pekerja sosial. Bimbingan sosial yang diberikan kepada Eks WTS yaitu berupa bimbingan keagamaan, spiritual, akhlak, bimbingan HIV/AIDS dan bimbingan budi pekerti. Menurut Robert S. Lynd (dalam Jusuf; 2005:4) proses bimbingan sosial yang berkadarkan proses belajar atau pendidikan sebagai berikut "ada suatu kecenderungan yang meluas

untuk menenteramkan diri kita sendiri dalam menghadapi kekurangan-kekurangan fungsional dari kebudayaan kita pada saat ini dengan mempercayakan diri dengan pendidikan. Bimbingan pribadi merupakan upaya untuk membantu individu dalam menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri serta sehat jasmani dan rohani, sementara bimbingan sosial merupakan upaya untuk membantu individu dalam mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur dan tanggung jawab.

Bimbingan ini diberikan untuk membantu individu dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial dan pribadinya. Bimbingan pribadi sukar dipisahkan dengan bimbingan sosial hal ini dikarenakan masalah pribadi tidak lepas dari masalah sosial. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bimbingan kepribadian sosial merupakan bantuan yang diberikan untuk menghadapi keadaan batinnya sendiri sdan mengatasi pengumpulan atau gejolak dalam hatinya guna mengatur dirinya pada aspek kerohanian, menjaga kondisi jasmani dan rohani.

## **2.5. Teori Pull dan Push**

Teori dorongan dan tarik (*Push and Pull Theory*) mengasumsikan bahwa setiap fenomena migrasi selalu berkaitan dengan daerah asal, daerah tujuan, dan macam-macam rintangan yang menghambat. Menurut Lee (dalam Subadi, 2009: 156) ada empat faktor yang berpengaruh untuk melakukan migrasi yaitu: 1)

faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, 2) faktor-faktor di daerah tujuan, 3) faktor rintangan dan 4) faktor pribadi.

Faktor-faktor di daerah asal dan daerah tujuan dapat bersifat positif, negatif atau bersifat netral. Faktor positif yaitu faktor yang memberikan nilai keuntungan bila bertempat tinggal di tempat tersebut. Faktor negatif yaitu faktor yang memberi nilai negatif atau merugikan bila tinggal di tempat tersebut sehingga seseorang merasa perlu untuk pindah ketempat lain. Faktor netral tidak berpengaruh terhadap keinginan seseorang individu untuk tetap tinggal ditempat asal atau pindah ketempat lain.

Dalam teori mobilitas sosial (*social mobility*) disebutkan bahwa ada dua arah dalam mobilitas sosial, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan yang lebih atas atau ke kelas yang lebih rendah, misalnya dari kelas ekonomi rendah ke kelas ekonomi menengah atau sebaliknya dari kelas ekonomi menengah ke kelas ekonomi rendah. Mobilitas horizontal adalah perpindahan dari kelas satu ke kelas yang lain dalam tingkat yang sama, misalnya Eks WTS yang bekerja di lokasi Dolly pindah ke lokasi Betiring yang mana lokasi tersebut di pinggiran kota dalam posisi pekerjaan yang sama sebagai PSK.

Dalam perpindahan penduduk atau migrasi dikenal suatu teori *pull and push* atau teori tarikan dan dorongan yang pertama kali dikemukakan oleh Ravenstein dan Collier (dalam Hadi Susatyo; 2006: 39). Yang dimaksud dorongan adalah faktor yang mendorong seseorang atau kelompok untuk pindah misalnya tempat

Eks WTS bekerja yang disebut lokalisasi di tutup oleh Pemerintah Kota sehingga mereka tidak memiliki penghasilan. Sedangkan yang dimaksud dengan tarikan adalah faktor yang menarik seseorang atau kelompok untuk pindah misalnya Eks WTS menemukan atau memiliki tempat baru.

Dari fenomenologi di atas keterkaitan teori *push* and *pull* dengan kehidupan Eks WTS di lokalisasi Betiring yaitu adanya penutupan secara tidak resmi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik, terkait dengan Perda No 15 tahun 2002 yang direvisi dengan Perda No 19 tahun 2004 tentang larangan peredaran minuman keras, dan Perda No 7 tahun 2002 yang direvisi Perda No 22 tahun 2004 tentang larangan pelacuran dan perbuatan cabul. Eks WTS merasa tertekan dengan Perda tersebut sehingga membuat Eks WTS merasa kecewa karena bagi mereka Perda tidak memberikan pesangon kepada Eks WTS terkait penutupan lokalisasi, sehingga terjadi Eks WTS melacurkan dirinya di tempat yang lain seperti di pinggir jalan, terminal dan kafe.

Fenomena ini juga terjadi pada penutupan Dolly dan Jarak pada tanggal 18 Juni 2014 terkait dengan Perda No 7 tahun 1999 tentang bangunan tidak boleh digunakan untuk kegiatan asusila dan perda No 2 tahun 2008 tentang kepariwisataan yang menjelaskan bahwa kegiatan usaha diskotik, panti pijat, klub malam, karaoke, *spa* dan *pub* (rumah musik) wajib dihentikan. Seperti Eks WTS yang berada di Betiring para PSK dan warga Dolly merasakan kecewa karena Dolly tempat mereka mencari rezeki di tutup dengan memberikan kompensasi untuk mucikari Rp 5.000.000 dan untuk PSK mendapatkan Rp.

3.000.000, tetapi pada kenyataannya para PSK yang sudah dipulangkan justru tidak berhenti bekerja sebagai PSK melainkan berpindah tempat ke Madura sebagai tempat baru untuk melacurkan dirinya. (hasil wawancara dengan salah satu PSK di Dolly tanggal 27-06-2014, jam 17.00).

## 2.6. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Tjahjono tahun 1983, dengan judul *Efektifitas Hukum dalam Mengatasi Pelacuran Sebagai Penyakit Sosial Suatu Tinjauan di Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya*. Dalam peneliti ini dapat ditemukan beberapa pendekatan yaitu pendekatan indisipliner dan pengajian secara multidisipliner, metode diskriptif analisis dengan hasil pengimplementasian hukum dalam mengatasi pelacuran sebagai penyakit sosial tidak dapat terlepas dari aspek sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hevni Rahmania tahun 2005, *Rehabilitasi Sosial Pelacuran (Studi Tentang Sistem Pembinaan Para Pelacur di Yayasan Modjopahit Kota Mojokerto)*. Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif dengan hasil para pekerja seks terjerumus ke dalam dunia prostitusi disebabkan faktor ekonomi dan semua pekerja seks bekerja di tempat prostitusi tidak diketahui oleh keluarga.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Okta Nur Efendi pada tahun 2006 dengan judul *Peraturan yang Dikaitkan dengan Prostitusi dan Langkah Penanggulangannya*. Dari penelitian bisa ditemukan penanggulangan masalah

prostitusi dapat dibagi menjadi dua, yaitu preventif dan represif. Preventif bersifat mencegah dan represif adalah usaha yang dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan (menghapus, menindas) dan menyembuhkan para wanita dari ketuna susilaan untuk membawa mereka ke jalan, dalam penanggulangan tempat prostitusi ini dapat mengurangi pengaruh buruh terhadap di lingkungan masyarakat.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan Rio Alfani dengan judul *Kontruksi Sosial Masyarakat di Lingkungan Pemakaman Kembang Kuning Surabaya Terhadap Aktivitas Prostitusi di Area Makam* tahun 2012. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian ketiga, yakni kontruksi sosial pelacuran yang di bangun bahwa pelacuran itu meberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat yang berbeda di sekitarnya. Hal ini dipengaruhi pengalaman hidup karena telah lama bertempat tinggal di kawasan sekitar pemakaman kembang kuning.

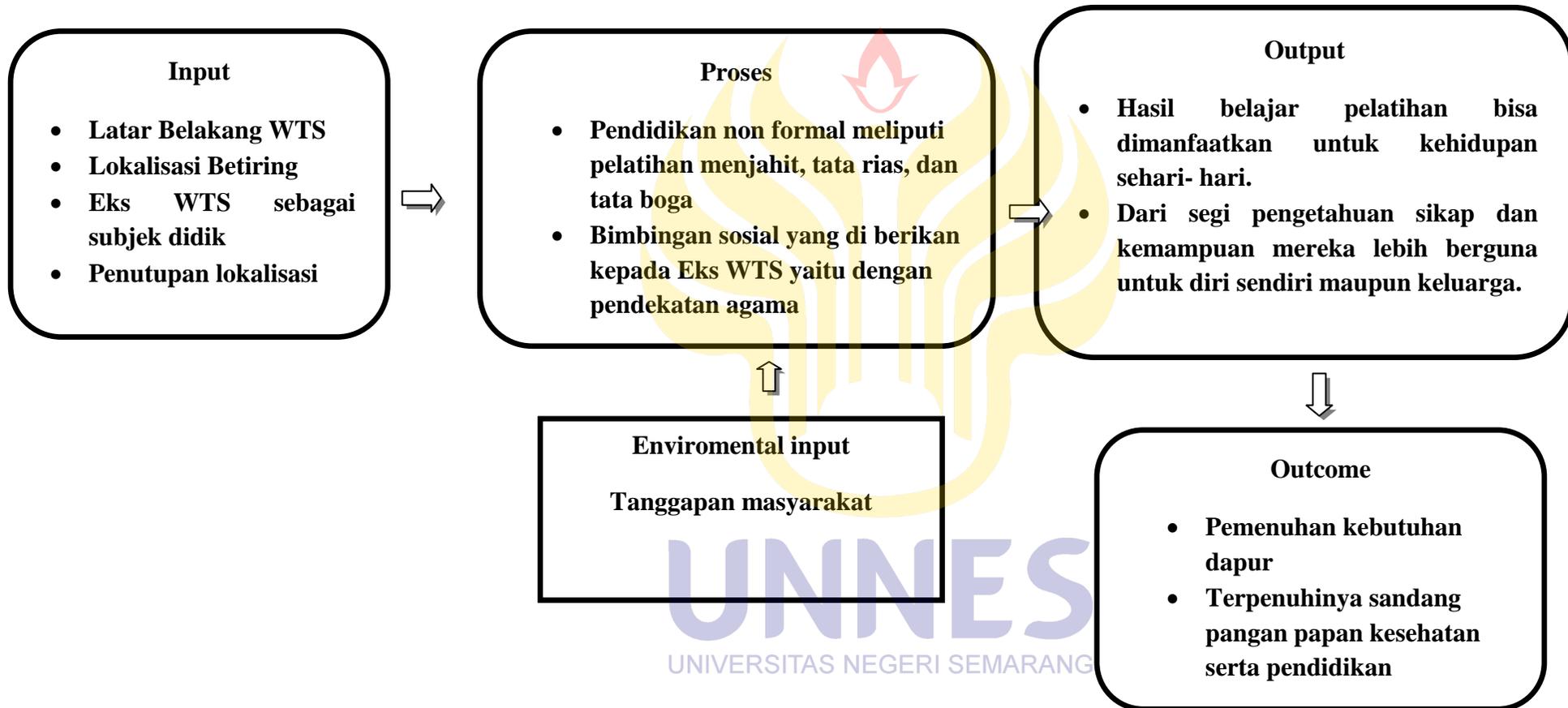
Sedangkan penelitian saat ini berupaya meneliti dampak penutupan lokalisasi, tanggapan masyarakat, peran Pendidikan Luar Sekolah dalam pembinaan Eks WTS melalui bimbingan sosial yang di berikan oleh Dinas Sosial dengan menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan interaksi simbolik. Pendekatan tersebut di terapkan di Dinas Sosial yang selanjutnya diharapkan mendapatkan bekal ilmu, seperti keterampilan sesuai dengan minat dan kemampuan. Dari beberapa penelitian yang sudah di lakukan terdapat kesamaan dari penelitian ini, kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Hevni Rahmania adalah pembinaan terhadap Eks WTS di yayasan Modjopahit Mojokerto. Disamping itu penelitian memiliki lingkup yang luas dari peneliti-

peneliti sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup wilayah Kabupaten Kediri.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## Kerangka Berfikir



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab IV dapat disimpulkan menjadi empat sebagai berikut.

##### 5.1.1. Latar belakang sosial eks WTS di lokasi Betiring sampai mengikuti pelatihan

Penyebab para perempuan bersedia menjadi WTS adalah faktor kepribadian, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keterpaksaan dari orang tua dll. Adanya lokasi Betiring sangat memengaruhi, budaya, sikap, dan bahasa, masyarakat sekitar. Perubahan bahasa terlihat dari bahasa masyarakat sekitar yang sarkastik. Perubahan sikap terlihat dari langgam berpakaian para remaja putri yang mengenakan pakaian minim. Gaya berbusana mereka terpengaruh oleh gaya penampilan WTS yang cenderung berpakaian seksi. Di sisi lain masyarakat mengalami perubahan kebiasaan—budaya setempat. Masyarakat sekitar sudah jarang melaksanakan tradisi sedekah bumi yang biasanya dilaksanakan setiap tanggal 27 Dzulkaidah. Kebanyakan para eks WTS mau mengikuti pelatihan diakibatkan mereka kebingungan untuk menyambung kehidupan mereka. Para eks WTS pada awalnya juga mereka terpaksa untuk mengikuti pelatihan sampai mereka menyadari pentingnya mengikuti pelatihan di UPT Rehabilitasi Tuna Susila Kediri.

##### 5.1.2. Proses pelaksanaan pelatihan yang ingin dicapai eks WTS di UPT Rehabilitasi Tuna Susila Kediri

Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Tuna Susila "Kediri". Pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial mempunyai rencana untuk mendirikan suatu Unit Pelaksana Teknis yang mana khusus menangani atau merehabilitasi masalah Wanita Tuna Susila (WTS) yang berlokasi di Jawa Timur. Penyampaian tujuan pelatihan menjahit, tata boga, salon, rias manten, dan sablon ini tidak hanya pada pemberian materi ajar kepada Eks WTS. Namun juga didukung dengan penyampaian setiap bahasan materi oleh tutor dengan metode penyampaian yang sebelumnya telah dipersiapkan. Metode pelatihan yang digunakan oleh tutor kali ini menggunakan metode ceramah dan praktik langsung dengan pembagiannya 20% materi dan 80% praktik langsung untuk setiap kali pertemuan. penetapan metode ini difungsikan agar klien tidak akan jenuh apabila berada dalam proses pembelajaran. Pelatihan ini berlangsung selama empat bulan dengan alokasi waktu setiap minggu untuk empat kali pertemuan dan dilaksanakan setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Pemberian pelatihan terhadap Eks WTS juga diiringi dengan pemberian bimbingan sosial, bimbingan sosial yang bertujuan memulihkan dan meningkatkan kemampuan fungsi sosial klien melalui bimbingan sosial kelompok dan perorangan.

#### 5.1.3. Faktor pendukung beserta penghambat pelaksanaan yang dihadapi eks WTS di UPT Rehabilitasi Tuna Susila Kediri

Setelah klien mendapatkan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan dilakukan evaluasi atau monitoring yang dilakukan oleh UPT RSTS kepada klien yang membuka usaha sendiri. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah bimbingan sosial dan keterampilan berhasil atau tidak. Pendidikan Luar Sekolah sebagai kegiatan pendidikan yang dilakukan secara terorganisasi,

terencana diluar sistem persekolahan, yang ditujukan kepada individu ataupun kelompok dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Satuan Pendidikan Luar Sekolah adalah lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis ta'lim dan satuan pendidikan yang sejenis. Pendidikan Luar Sekolah memberikan pendidikan kecakapan hidup yang diartikan sebagai pendidikan untuk meningkatkan kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjaga kelangsungan hidup dan pengembangan dirinya.

## 5.2. Saran

Berdasarkan simpulanyang sudah didiskripsikan, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut.

- 5.2.1. Dampak penutupan lokalisasi di Kecamatan Betiring ini sebaiknya tidak dilihat dari satu perspektif. Masyarakat harus bijaksana dalam menyikapi penutupan lokalisasi. Masyarakat yang menolak penutupan pada umumnya beralasan tentang menurunnya penghasilan pribadi. Jika dilihat dari sisi positifnya, penutupan ini menguntungkan. Pertama, pemerintah telah menyelamatkan eks WTS dari dunia prostitusi yang dilarang oleh agama, adat istiadat, dan khususnya moralitas kemanusiaan. Kedua, dengan ditutupnya lokalisasi para Eks WTS harus lebih lebih mempunyai gagasan yang berani dalam artian mereka harus mempunyai ide atau gagasan untuk mempunyai pengalaman yang dibutuhkan masyarakat sekitar dan terbebas dari pengaruh negatif dari lokalisasi seperti sikap, bahasa, dan perilaku.

- 5.2.2. Untuk pelaksanaan pelatihan berikutnya tutor harus didatangkan tenaga pengelola dan pendidik dari luar supaya para eks WTS dapat mengambil dan menerima ilmu lebih banyak lagi untuk pelatihan yang lebih baik lagi. Dan akan terbukti dengan adanya lulusan binaan UPT RSTS para wanita membuka usaha mandiri atau bahkan sudah membuka usaha sesuai dengan program yang diikuti selama menjalani rehabilitasi. Untuk peningkatan mutu pengelolaan tenaga pendidik yang berkualitas diwajibkan untuk mengikuti seminar dan pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi maupun dinas sosial.
- 5.2.3. Untuk faktor pendukung beserta pelaksanaan dan penghambat dilihat dari peran serta eks WTS harus lebih memahami dan lebih mengerti dikarenakan mereka yang akan terjun didalam masyarakat secara langsung dan membaaur dalam kehidupan masyarakat disekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam.1984. *Pelacuran dan Pemerasan*. Bandung: Alumni.
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Irawan dan Suparmoko. 1990. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE.
- Jusuf, Chusnan.2005a. *Praktik Pekerja Sosial Dalam Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Balatbangsos Depsos RI.
- Kunjoro. 2004. *Tutur Dari Sarang Pelacur*, Yogyakarta: Tinta.
- Moleong, Lexy J. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mudjijono. 2005. *Sarkem*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press.
- Kartono, Kartini. 2011. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Priyatna, Haris. 2013. *Kamus Sosiologi*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Rahmat, Jalaludin.2012. *Psikologi Komunikasi*. Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Santoso, Slamet. 2010. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sobur, Alex. 2003. *Psikologi Umum*. Bandung: pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono.2001. *Sosiologi Sebuah Pengantar*, Jakart: PT. Raja Grafindo.
- Sugiyono.2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Shadily, Hassan.1983. *Sosiologi Untuk Rakyat Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Sulasmono, Bambang Suteng. 2006. *Sosiologi SMA kelas x*. Jakarta: PT.Phibeta Aneka Gama.

- Suyanto, Bagong, Susulo. Dkk. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga Universitas Press.
- \_\_\_\_\_.2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_.2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_.2012. *Undand-undang Penanganan Fakir Miskin dan Kesejahteraan Sosial..* Bandung: Fokusindo Mandiri
- \_\_\_\_\_.2013. *Undand-undang Tentang Hak Asasi Manusia*. Jogjakarta: Buku Biru.
- Subadi, Tjipto.2009. *Sosiologi dan Sosiologi Pendidikan Suatu Kajian Baru dari Perspektif Sosiologi Fenomenologis*.Kartasura: Tidak di terbitkan
- Surjono, Gunanto, Dkk. *Eksistensi Lokalisasi Doly*. Yogyakarta : Badan besar Peneliti dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- Hadi, Susatyo. 2006. *Analisis Faktor Pendorong dan Penarikan Keinginan Perawatan Kontrak Menjadi Pegawai Negri Sipil Studi Kasus di Graha Amerta RSU Dr. Soetomo Surabaya Berdasarkan Teori Pull and Push*
- Alifatul, Fafida. 2011. *Mantan Pelacur (Studi Tentang Persepsi Mantan Pelacur Berkaitan Dengan Pandangan Masyarakat)*
- Mujiman Haris, 2006. *Manajemen Pelatihan Berbasis Belajar Mandiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salinding, Rony.2011. *Analisis Pengaruh Pelatihan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. ERAJAYA SWASEMBADA. Skripsi, Makassar : Universitas Hasanuddin.*
- Siswanto, 2011. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa.
- Sugiyono. 2008. *Metode Pelatihan Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Ditjen PLSP. 2004. *Pedoman Penyelenggaraan Program Kecakapan Hidup (Life Skills) Pendidikan Non Formal*. Jakarta : Ditjen PLSP.
- Ditjen PLS. 2003. *Program Life Skills Melalui Pendekatan Broad Based Education (BBE)*. Jakarta : Direktorat Tenaga Teknis Depdiknas.

Hasan, ES, 2007. *Strategi Menciptakan Manusia yang Bersumber Daya Unggul*, Bandung : Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, UPI.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

